



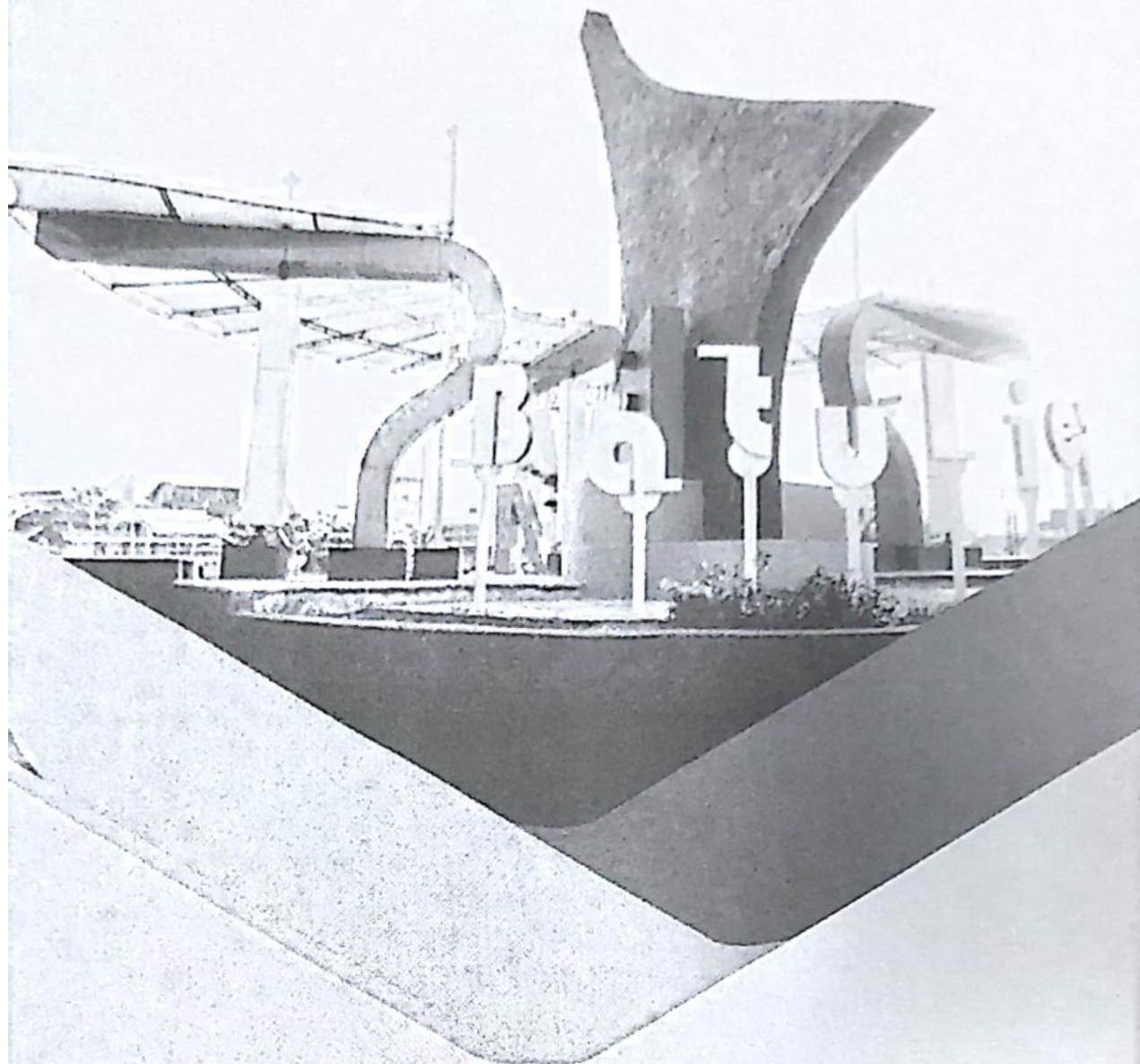
PEMETAAN WILAYAH **POTENSI KONFLIK** DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Andi Tenri Somba, dkk



CEPP - ULM



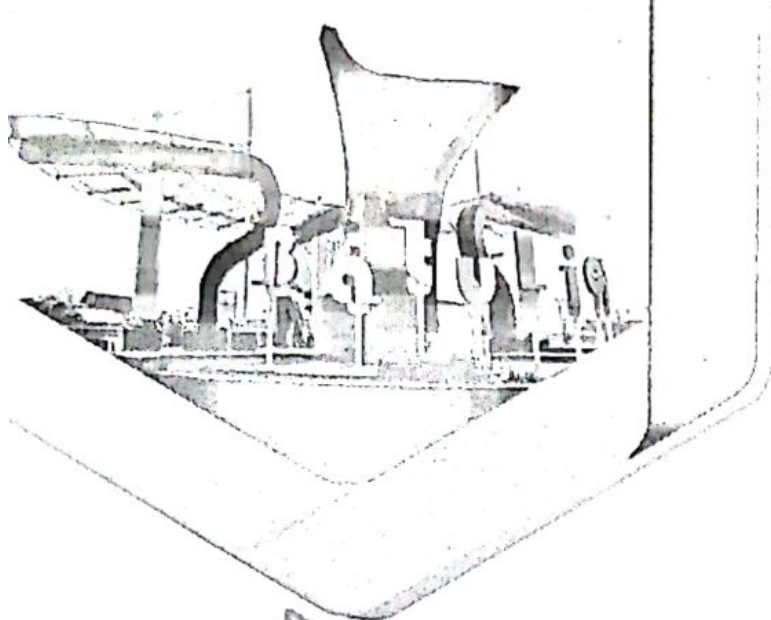


PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK

DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Andi Tenri Sampa, dkk





PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK

DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016



Penyusun :

**Andi Tenri Sempa
Darmiadi
Varinia Pura Damaiyanti
Ahmad Asmadi**



CEPP - ULM

"Making Democracy Works for Indonesian People"

Kerjasama

**Center for Election and Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin**

dengan

**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu
2017**



**PEMETAAN WILAYAH
POTENSI KONFLIK**
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

Andi Tenri Sompia, dkk

@2017

All rights reserved

xvi + 214 hal; 15,5 x 23,5 cm

ISBN:

978-602-51130-0-0

Desain Cover & Layout :

Rasta Albanjari

Editor :

Pathurrahman



CEPP - ULM

Diterbitkan Oleh :

Center for Election And Political Party (CEPP)

Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Banjarmasin

Dicetak Oleh :



Pustaka Banua

KUTIPAN PASAL 27
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta
(UU No.19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), diidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CEPP - ULM
"Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Data Politik"




BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SAMBUTAN

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua

yukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa, tak lupa shalawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Kami menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tanah Bumbu dengan diterbitkannya buku "Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017". Dimana dengan data-data yang terinformasikan faktual pada pemetaan wilayah potensi konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan mengambil langkah strategis secara cepat, tepat dan akurat.

PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN TANAH BUMBU 2016

Oleh karena itu, kami selaku pemerintah daerah berharap, melalui buku ini seluruh masyarakat dapat mengetahui gambaran informasi, sekaligus menjadi referensi terhadap isu-isu konflik sosial yang terjadi di daerah. Sehingga memudahkan pihak terkait dalam merumuskan berbagai kebijakan, dalam upaya pencegahan dan memberikan resolusi terhadap penanganan konflik secara komprehensif.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terimakasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batulicin, Nopember 2017

Bupati Tanah Bumbu,

Mardani H. Maming

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Penelitian dan Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu.

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatannya. Untuk itu, kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, khususnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang terus memberikan dukungan kepada kami dalam melaksanakan penelitian dan pemetaan ini.

Juga kepada tim *Center for Election and Political Party* (CEPP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan buku ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi isi, susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki hasil penelitian dan pemetaan ini selanjutnya.

Akhir kata kami berharap semoga hasil penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil kebijakan terkait penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi di Tanah Bumbu demi terciptanya suasana yang aman, nyaman dan kondusif.

Tanah Bumbu, Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

	hal
Sambutan	
Bupati Kabupaten Tanah Bumbu	x
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	3
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sasaran	13
BAB II Tinjauan Pustaka	15
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Kerangka Teori	23
2.3 Konflik Sosial	37

2.4 Teknik Pemetaan Konflik	45
BAB III Metode Penelitian	49
3.1 Desain Penelitian	51
3.2 Sumber Data	55
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	57
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	59
3.5 Pelaksanaan dan Sumber Pembiayaan	61
3.6 Luaran Penelitian	63
3.7 Kendala Penelitian	65
3.8 Sistematika Penulisan	67
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
4.1 Penjelasan Umum	71
4.2 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu	73
4.3 Kependudukan	73
4.4 Mata Pencarian	81
4.5 Sektor Perkebunan	83
4.6 Kehutanan	85
4.7 Perikanan dan Kelautan	87
4.8 Ekonomi	89
4.9 Politik	93
4.10 Transportasi	95
4.11 Sosial Budaya	97
4.12 Potensi Pengembangan Wilayah	103
BAB V Persebaran Potensi Konflik	73
5.1 Konflik Lahan	75
5.2 Konflik Pertambangan	84
5.3 Konflik Perairan	86
5.4 Konflik Perbatasan	88
5.5 Konflik Antar Etnis	91
5.6 Konflik Antar Umat Beragama	92
5.7 Konflik Pilkada	93
5.8 Potensi Narkoba	94
BAB VI Pemetaan Wilayah Potensi Konflik	97
6.1 Sumber Konflik (<i>Source</i>)	99

6.2 Isu (<i>Issue</i>)	100
6.3 Pihak-Pihak Yang Berkonflik (<i>Parties</i>)	101
6.4 Sikap (<i>Attitudes</i>)	104
6.5 Perilaku (<i>Behavior</i>)	106
6.6 Intervensi (<i>Intervention</i>)	108
6.7 Hasil Akhir (<i>Outcome</i>)	110
6.8 Pemetaan Wilayah Potensi Konflik	111
BAB VII Penutup	117
7.1 Kesimpulan	119
7.2 Rekomendasi	123
Daftar Pustaka	125
Susunan Tim Peneliti	133
Peta Wilayah Potensi Konflik Per Kecamatan	137
Biodata Penyusun	145

BAB I

PENDAHULUAN

(1.1)

Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaan. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia.

Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif (*negative stereotyping*) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan

ikatan solidaritas sosial sehingga dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik sosial.

Konflik merupakan gejala-gejala sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Selama masyarakat ada, selama itu pula konflik ada dalam masyarakat itu. Meskipun konflik merupakan gejala yang universal, konflik mempunyai dampak yang amat besar bagi masyarakat karena konflik yang berlangsung terus menerus akan menjurus kearah disintegrasi sosial¹⁾.

Banyak orang beranggapan bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik, sehingga konflik lisan dalam bentuk debat, polemik, perbedaan pendapat, dan sebagainya yang hanya terbatas pada saling menyerang dengan kata-kata tidak dapat disebut konflik. Padahal konflik lisan yang seolah tidak berbekas, justru merupakan potensi konflik yang sesungguhnya yaitu konflik fisik.

Napak tilas eskalasi konflik sosial di Indonesia pasca era Reformasi 1998 memiliki pola yang khas. Pada medio 2012, Kementerian Dalam Negeri merilis jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian, meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus²⁾.

Bila ditelusuri lebih lanjut, terjadinya konflik sosial kala itu cenderung disebabkan oleh lemahnya *sharing of understanding and acceptance* di tengah masyarakat yang menyangkut ruang, kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan. *Conflict of interest* dan *conflicting ideas* awalnya hanya sebuah perdebatan yang mampu menyulut konflik sosial yang berkepanjangan.

Pada April 2014 lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) merilis bahwa di Indonesia terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang

¹⁾ Lihat, Maswadi Rauf. (2000). "Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis", Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1

²⁾ Lihat, Antaranews, 2012.

tersebar di enam pulau. Sepanjang 2013 lalu, di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat (24), di Jakarta (18), di Sumatera Utara (10), di Sulawesi Tengah (10) dan di Jawa Tengah (10) (JPNN, 2014). Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya konflik sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu Kemensos juga meluncurkan program keserasian sosial di 50 wilayah rawan konflik sosial dan program penguatan kearifan lokal di 30 daerah.

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia, yang memiliki keaneka ragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Setiap manusia mementingkan dirinya sendiri dan ingin memperoleh kenikmatan hidup secara kebendaan (material) dalam kehidupannya, kecenderungan manusia berusaha memperoleh keuntungan baginya dalam setiap kesempatan. Sifat pribadi manusia tersebut bisa menjadi penyebab munculnya konflik.

Sebagaimana Maurice Deverger menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya sebab-sebab individual³⁾. Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (*resource and position scarcity*)⁴⁾.

³⁾ Lihat, Maurice Duverger "Sosiologi Politik", Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 174-175.

⁴⁾ Lihat, Ted Robert Gurr, "Introduction" dalam Handbook of Political Conflict: Theory and Research, New York: NY: The Free Press, 1980, hal.3

Konflik sosial terjadi karena adanya kegiatan-kelangkaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Hal ini juga sama dengan sumber-sumber, kedudukan atau posisi atau jabatan yang langka dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial, konflik memiliki beberapa persyaratan agar sebuah hubungan sosial dapat disebut sebagai sebuah konflik sosial.

Ted Robert Gurr menyebutkan sedikitnya terdapat empat ciri konflik⁵. Ciri yang pertama adalah ada dua atau lebih pihak yang terlibat. Kedua, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi. Ketiga, mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai. Keempat, menghalang-halangi lawannya dan interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen. Dari ciri tersebut dapat diidentifikasi jenis-jenis konflik sosial yang terjadi.

Oleh karena kecenderungan sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain atau kelompok lain, maka menurut Thomas Hobbes, sifat-sifat manusia seperti ini yang dapat menghancurkan umat manusia apabila negara (penguasa politik) tidak ada. Hobbes juga mengungkapkan bahwa, perlu adanya kekuasaan politik yang mengatur masyarakat⁶.

Negara dan hukum amat diperlukan di dalam masyarakat untuk mencegah setiap orang mencapai keinginan dan keperluannya sendiri dengan cara-cara merugikan orang lain. Dapat

⁵ Ibid, hal. 2

⁶ Terdapat banyak literature yang menggambarkan pemikiran Thomas Hobbes. Antara lain, lihat George H. Sabine dan Thomas L. Thorson, "A History of Political Theory", Edisi Empat, Hinsdale, IL: Dryden, 1973. Dapat juga dilihat pada, Lee Cameron McDonald, "Western Political Theory", New York: NY Harcourt Brace Jovanovich, 1968.

pula dikatakan bahwa, negara dan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial, paling tidak dapat mengurangi konflik karena adanya "ketakutan" terhadap hukum dan aparat negara yang memaksa⁷.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen. Ragam suku, agama dan sumber daya alam yang luar biasa, menempatkan Tanah Bumbu sebagai wilayah yang strategis serta memiliki potensi konflik yang cukup mengkhawatirkan. Potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur dan perbedaan kepentingan dari heterogenitas masyarakatnya.

Tanah Bumbu merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, juga menyiapkan dan membangun infra struktur berupa puluhan pelabuhan khusus untuk pengangkutan maupun jalur perdagangan baik batu bara, bijih besi dan kelapa sawit. Selain itu terdapat pula pelabuhan umum milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III cabang Kotabaru serta pelabuhan penyeberangan milik PT ASDP. Kehadiran sumber-sumber ekonomi tersebut, tentunya memberikan keuntungan ekonomi berupa Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar jumlahnya, serta mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat⁸. Di sisi lain, juga menimbulkan potensi konflik sosial, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antar sesama masyarakat, juga masyarakat dengan pemerintah daerah karena adanya kewenangan yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat, khususnya terkait konflik lahan dan perbatasan wilayah⁹.

⁷ Lihat Rauf, Op.Cit., hal. 5

⁸ Lihat, Andi Tenri Sempa, "Pengusaha Lokal dan Bisnis Tambang Batubara", sebuah Disertasi yang telah dipertahankan pada sidang terbuka Program Doktorat Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016 dan sedang dalam proses penerbitan menjadi buku ilmiah, hal. 6

⁹ Lihat, Sempa, Ibid, hal. 176

Fenomena perkembangan Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat pesat, kondisi ini amat rentan terjadinya konflik sosial secara lebih luas. Faktanya, beberapa tahun terakhir berbagai konflik telah terjadi. Permasalahan lahan dan pertambangan menjadi konflik yang mendominasi.

Belum lagi permasalahan tenaga kerja, batas wilayah baik antar kabupaten maupun antar desa, perkembangan aliran keagamaan, arogansi berdasar kesukuan, perkebunan, industri, politik dan perdagangan serta masalah transportasi. Kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah, penting untuk konteks memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat Tanah Bumbu.

Masalahnya, terjadinya konflik dan upaya pemecahannya tidak dapat dilakukan jika identifikasi terhadap potensi konflik itu sendiri belum ditemukan. Oleh karena itu, amat penting untuk dilakukan penelitian berbasis pemetaan wilayah konflik sosial dan jenis konflik yang sedang serta berpotensi untuk terjadi di masa mendatang, yang dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu.

Pemetaan Wilayah dan identifikasi potensi konflik menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan, yang akan sangat membantu dalam konteks upaya pencegahan serta memberikan resolusi terhadap konflik tersebut.

(1.2)

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pemetaan Wilayah Potensi Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
4. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Penyelesaian Konflik Sosial.
5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2015

tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Pasca Konflik Sosial.

6. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/67/KESBANGPOL/2016 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

(1.3)

Maksud dan Tujuan

Kegiatan penelitian pemetaan wilayah potensi konflik sosial bermaksud untuk mengidentifikasi masalah konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi pemetaan terhadap data kuantitatif dan kualitatif di sepuluh kecamatan yang ada. Lebih spesifik lagi cakupan dalam pemetaan konflik secara kuantitatif, cakupannya adalah isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak. Sedangkan data kualitatif terkait dengan penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta proses penyelesaian konflik didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah, untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif terkait pemetaan wilayah potensi konflik, beserta jenis konflik yang sedang terjadi dan yang berpeluang untuk menjadi konflik baru berbasis kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan dalam menindak lanjuti hasil yang diperoleh.

(1.4)

Sasaran

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pemetaan wilayah potensi konflik tersebut, terdapat beberapa output yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Data dan informasi serta analisis tentang jenis konflik sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga memudahkan berbagai pihak dalam merumuskan bentuk kebijakan yang perlu diambil dalam rangka pengurangan resiko konflik sosial.
2. Peta daerah rawan konflik yang dapat digunakan sebagai referensi bagi multi *stakeholders* terkait jenis dan penyebaran konflik sosial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Analisis peta daerah rawan konflik yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rekomendasi, terkait dengan

jenis dan penyebaran konflik sosial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

* * *

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

(2.1)

Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi tentang konflik dilakukan oleh para ahli ilmu sosial yang dilihat dalam berbagai perspektif. Studi-studi tersebut membahas beragam aspek terhadap fenomena potensi konflik dalam masyarakat. Ada yang membahas aspek kebijakannya, ada yang membahas aspek hubungan pemerintah dan masyarakat, ada pula yang membahas aspek konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal dan lain-lain. Berikut ini dikemukakan beberapa studi terbaru mengenai fenomena pertambangan dalam perspektif Ilmu Politik.

Penelitian Siswoyo tentang keterkaitan antara menipisnya sumber daya hutan disebuah daerah di Jawa Timur dengan tampilnya kekuatan pasar. Penelitian itu melihat bahwa hutan rakyat yang selama ini menjadi penopang kehidupan ekonomi petani setempat, dalam tahun-tahun terakhir justru dirambah oleh pemilik modal.

Para petani yang secara ekonomi subsisten dipaksa berhadapan dengan para pengusaha yang bermodal besar. Di satu sisi, petani didorong masuk hutan untuk menebang dan mengangkut kayu untuk diserahkan kepada tengkulak yang menjadi agen pengusaha kayu.

Kondisi ekonomi tengkulak jauh lebih baik dan sejahtera ketimbang petani. Sementara negara, ternyata tidak ikut mengambil peran apa pun dalam konteks ini, kecuali hanya berkepentingan dengan pungutan retribusi dari pengusaha kayu¹⁰.

Lebih spesifik dalam kasus tambang, terdapat beberapa penelitian terbaru yang secara khusus menelaah aspek konflik dalam industri pertambangan, baik konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, konflik segi-empat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pengusaha tambang, maupun konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal.

Konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditunjukkan oleh penelitian Kurniawati dengan mengambil kasus penentuan dana bagi hasil dari eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Daerah atau pemerintah daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat yang menentukan pola hasil dengan daerah. Melalui Undang-Undang Perimbangan Keuangan, pemerintah pusat menentukan pola bagi hasil.

UU itu digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh daerah-daerah di Kalimantan Timur. Daerah merasa menanggung beban lingkungan dan sosial dari eksploitasi sumber daya alam.

¹⁰ Lihat, Bambang Siswoyo. (2007). "Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11, Nomor 2, November, hal. 153-286.

Daerah juga selalu dihadapkan pada konflik horizontal antara pengusaha dengan masyarakat lokal. Padahal, keuntungan ekonomi dari eksploitasi tersebut lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat¹¹.

Konflik segi-empat antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah dan pengusaha tambang dapat dilihat dari penelitian Rahardjo yang membahas kasus divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NTT). Penelitian itu melihat bahwa telah terjadi kompetisi yang sengit antara pemerintah pusat, DPR RI dan pemerintah daerah dalam mendapatkan saham divestasi dari PT NTT. Pemerintah pusat ingin mendapatkan setidaknya 7 persen dari divestasi itu, tetapi DPR RI justru menghambatnya bahkan mengadukan pemerintah ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat) justru merasa lebih berhak dengan saham divestasi tersebut. Konflik menjadi rumit ketika PT NTT mengajukan tawaran untuk membeli sendiri saham divestasi itu, atas nama pemerintah daerah. Konflik pun berkepanjangan hingga harus diselesaikan di meja lembaga arbitrase internasional Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law)¹².

Berbeda dengan penelitian Kurniawati dan Rahardjo, penelitian Astuti melihat konflik justru terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, mengeluarkan kebijakan mengenai penambangan pasir besi. Masyarakat Kulonprogo menolak kebijakan tersebut. Hal itu kemudian memunculkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

¹¹ Lihat, Tenti Kurniawati. (2012). "Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 16, Nomor 1, Juli (hal. 16-25).

¹² Lihat, Hafid Rahardjo. (2012). "Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)", dalam *ibid*, (hal. 26-44).

Penelitian itu menunjukkan dengan jelas terjadinya pertarungan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan berbasis bisnis tambang¹³.

Penelitian D.D. Cahyati dengan mengambil kasus penambangan pasir besi di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menetapkan secara sepihak lahan kaya sumber daya alam (pasir besi) sebagai wilayah penambangan. Masyarakat setempat, terutama yang berada di sekitar obyek tambang itu, tidak pernah tahu rencana dan keputusan pemerintah. Selain merasa tidak dilibatkan, masyarakat setempat juga sangat takut akan dampak dari keberadaan kegiatan pertambangan di dekat tempat tinggal mereka. Penolakan masyarakat ternyata harus berhadapan dengan kekuatan pemerintah daerah dengan melibatkan DPRD dan militer (TNI AD), sehingga posisi masyarakat pun terdesak dan tercerai-berai¹⁴.

Sebuah penelitian cukup menarik ditawarkan Amin dengan mengambil kasus Blok Cepu, Jawa Tengah. Penelitian ini dengan jelas melihat, disatu sisi betapa pemerintah berusaha mengambil keuntungan ekonomi dan politik dari kegiatan investasi pertambangan minyak Blok Cepu. Di sisi lain, pemerintah atau negara menunjukkan ketidak berdayaannya ketika berhadapan dengan tekanan dan kekuatan perusahaan multinasional Exxon Mobil yang didukung Amerika Serikat di bawah George W. Bush. Pemerintah Indonesia lebih berkepentingan untuk memenangkan Exxon Mobil dalam tender, ketimbang Pertamina yang sebenarnya memiliki kapasitas memadai untuk mengelola Blok Cepu¹⁵.

¹³ Lihat, Eka Zuni Lusi Astuti. (2012). "Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo", dalam *ibid*, (hal. 62-74).

¹⁴ Lihat, Devy Dhian Cahyati. (2013). "Pertarungan Aktor dalam Konflik Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu Kebumen", dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol. I, No. 2, April – September, (hal. 17-30).

¹⁵ Lihat, Akhmad Bakhtiar Amin. (2012). *Tangan-tangan Elit Di atas Blok Cepu: Dinamika Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Terbit Press.

Untuk penelitian pemetaan wilayah potensi konflik ini, hanya mengidentifikasi wilayah konflik dan jenis konflik yang terjadi dan yang berpotensi terjadi. Penelitian ini belum pada tahapan menemukan resolusi konfliknya. Harapannya bahwa dengan diketahuinya petaan wilayah dan jenis konflik yang berkembang di tengah masyarakat maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pendeteksian dini terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi.

* * *

(2.2)

Kerangka Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori SIPABIO dan beberapa teori penunjang lainnya, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Good Governance

Secara harafiah *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, yang didalamnya mengandung unsur akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Dalam *Good Governance* terdapat tiga unsur, yaitu negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga unsur itu harus bersinergi sehingga tercipta pemerintahan yang baik.

Kashi Nisjar dalam Domai¹⁶ mengemukakan bahwa unsur-unsur pemerintahan dikelompokkan menjadi tiga kategori:

¹⁶) <http://www.goodgovernance/cmd/astikel.htm>

1. Negara/Pemerintah : konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta : pelaku sektor swasta menyangkut perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani : kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Masuknya investor ke suatu daerah adalah contoh penerapan Good Governance pada tingkat daerah, dalam hal ini menyangkut otonomi daerah, dimana penekanan ada pada mekanisme pasar dalam pembangunan ekonomi. Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dipandang sama kedudukannya dalam konsep ini, yang dalam penerapannya dipandang mampu menghadapi masalah atau konflik demi tercapainya kesejahteraan bersama.

2.2.2. Teori Konflik

a. Definisi Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin configure yang berarti saling memukul, secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial dua orang atau lebih dimana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Coser¹⁷ menyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atas tuntutan yang

¹⁷⁾ Limbong, Bernhard, 2012, Konflik Pertanian, Jakarta: Margaretha Pustaka.

berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan, dan menghancurkan lawan mereka.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya.

Dalam sejarah umat manusia, perbedaan itulah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Dari sini, ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga serta pertemanan. Konflik terjadi di masa lalu, sekarang dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konflik, definisi tersebut tampak berbeda walaupun intinya sama, karena mereka mendefinisikan konflik dari perspektif yang berbeda. Ada yang mendefinisikan dari perspektif Sosiologi, Psikologi, Komunikasi, Antropologi, dan Politik¹⁸.

1. Menurut Joce L. Hocker dan William W. Wilmot (1985), definisi konflik adalah *"...an expressed struggle between at least two interdependent parties who perceived in compatible goal, scarce rewards, and interference from other party in achieving their goals."*

¹⁸⁾ Wirawan, 2016, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Jakarta: Salemba Humanika.

2. Menurut Joel A. Digirolamo, definisi konflik adalah *"A process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between it self and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to them."*
3. Menurut Stephen P. Robbins (1990), definisi konflik adalah *"We define conflicts as a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by same form of blocking that will result in 'frustrating B' in attaining his goals or furthering his interest."*
4. Menurut Gareth R. Jones (1995), definisi konflik adalah *"Organizational Conflict is the clash that occurs when the goal-directed behavior of one group blocks or thwarts the goals of another."*
5. Menurut Daniel Dana (2001), definisi konflik adalah *"Workplace conflict: A condition between or among workers who seek jobs are interdependent, whose feel angry, who perceive the other(s) as being at fault, and who act in a ways that cause a business problem."*
6. Menurut J. Frost dan W. Wilmot (1978), definisi konflik adalah *"Conflict is the interaction of interdependent people who perceive in compatible goals and interference from each other in achieving those goals."*
7. Menurut Kirk Blackard dan James W. Gibson (2003), definisi konflik adalah *"Workplace conflict is a dynamic process reflecting the interaction of two or more interdependent parties same level of difference or in compatibility between them."*

b. Konflik dalam perspektif Satya Graha

Mohandar Karachad (Mahatma) Gandhi adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan India dalam melawan pemerintah

penjajahan Inggris. Beliau mengemukakan konsep konflik perlawanan tanpa kekerasan (*non-violent conflict*) yang terkenal dengan nama "Satya Graha".

Satya Graha berasal dari bahasa Sansekerta: satya, artinya kebenaran dan agraaha yang artinya teguh. Konsep Satya Graha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar. Satya Graha berasal dari ajaran agama Hindu Ahimsa yang melarang orang menyakiti semua makhluk dan harus menghindari kekerasan. Satya Graha dikembangkan Gandhi dalam strategi dan taktik konflik berikut ini¹⁹⁾:

- a. Strategi Langkah Bijak : Gandhi lebih memilih strategi langkah bijak dari pada eskalasi spiral. Setiap kampanye Satya Graha menggunakan suatu seri langkah-langkah, masing-masing lebih menantang bagi lawan konflik. Langkah itu dimulai dengan negosiasi dan arbitrase yang meliputi :
 - Pengumpulan dan analisis fakta di tempat konflik dengan partisipasi lawan konflik.
 - Mengidentifikasi minat yang sama dengan lawan konflik.
 - Formulasi tindakan dan diskusi yang diterima lawan konflik
 - Upaya untuk kompromi, tetapi tidak mengalah dalam suatu hal yang esensial.

Gandhi menghindari eskalasi konflik lebih jauh. Pada fase ini ia membangun kerja sama dan hubungan personal dengan lawan konflik, sehingga membatasi antagonisme yang umumnya timbul dalam proses eskalasi konflik.
- b. Taktik Konflik : jika dengan langkah-langkah sebelumnya, konflik tidak dapat diselesaikan, para "Satya Grahis" –pihak yang melaksanakan prinsip Satya Graha- harus menyiapkan dan melaksanakan tindakan langsung berupa agitasi,

¹⁹⁾ Ibid, 18.

ultimatum, pemboikotan ekonomi, pemogokan, nonkooperasi, pembangkangan sipil, perampasan fungsi-fungsi pemerintahan dan penciptaan pemerintahan paralel.

Jika salah satu dari tindakan tersebut dapat menyelesaikan konflik, tindakan berikutnya tidak diperlukan. Akan tetapi, setiap langkah baru selalu mencakup periode penarikan diri, refleksi serta analisis mengenai posisi diri sendiri dan lawan konflik. Yang tidak terjadi adalah, eskalasi konflik normal dimana respon kekerasan terjadi dalam bentuk spiral kekerasan yang makin meningkat.

Teori konflik Satya Graha berasumsi bahwa tindakan non kekerasan akan menimbulkan respon yang sama dari pihak lawan konflik. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan proses rekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat konflik. Akan tetapi, keberhasilan dari teori Satya Graha sangat tergantung pada aksi massa yang digerakkan secara massal.

Dalam hal aksi massa, pemimpin yang kuat dengan pola kepemimpinan transformasional dan karismatik sangat diperlukan. Penerapan teori Satya Graha dalam konflik perjuangan kemerdekaan di India membuat pemerintah penjajahan Inggris menyerah dan memberikan kemerdekaan.

2.2.3. Konflik dan Teori Pertukaran Sosial

Beberapa hal yang bisa menimbulkan konflik dalam interaksi sosial, yaitu keadilan (*justice*), kewajaran (*equity*), persamaan hak (*equality*) dan kekuasaan (*power*)²⁰.

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan yang berhubungan dengan distribusi barang dan jasa yang

²⁰ Kabanoff, B, 1991, Equity, Equality, Power, and Conflict, The Academy of Management Review.

mempunyai nilai ekonomi serta distribusi suatu kondisi yang mempengaruhi kesejahteraan, terdiri dari aspek-aspek psikologi, fisik, ekonomi dan sosial. Jika distribusi barang dan jasa dilakukan secara tidak adil, konflik bisa timbul.

- b. Keadilan prosedural (*procedural justice*), keadilan mengenai prosedur untuk mendapatkan barang dan jasa.
- c. Kewajaran (*equity*), dalam suatu kerja sama dimana produktivitas ekonomi merupakan tujuan utama, kewajaran lebih merupakan prinsip utama dari pada persamaan hak dalam keadilan distributif.
- d. Persamaan hak (*equality*), apabila tujuan interaksi sosial untuk mengembangkan atau mempertahankan kekohesifan hubungan sosial yang menyenangkan, maka persamaan hak merupakan prinsip dominan dalam hubungan sosial. Persamaan hak artinya setiap orang yang berinteraksi sosial sebagai individu mempunyai nilai yang sama dan menciptakan kondisi optimal untuk memelihara harga diri (*self-esteem*). Persamaan hak dalam keluaran berarti setiap anggota mempunyai nasib yang sama (*commonfate*), yang akan mengembangkan solidaritas dalam interaksi sosial. Ketiadaan persamaan hak akan meniadakan kekohesifan hubungan sosial yang akan mengarah timbulnya suatu konflik.
- e. Kekuasaan (*power*), dalam suatu interaksi sosial, kekuasaan (*power* atau *social power*) juga berperan. Dalam suatu interaksi sosial, kekuasaan merupakan hasil ketergantungan diantara dua pihak yang berinteraksi. Seseorang yang mempunyai kekuasaan mempunyai potensi lebih besar dan kemampuannya lebih besar untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu interaksi sosial. Ia juga berupaya lebih banyak mempengaruhi orang lain daripada orang yang mempunyai kekuasaan lebih kecil.

Pada umumnya, ia juga lebih berhasil mempengaruhi mereka yang mempunyai kekuasaan lebih kecil. Dengan demikian, ia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dalam suatu interaksi sosial.

2.2.4. Konflik Realistis dan Konflik Non-Realistis

Lewis Coser²¹ mengelompokkan konflik menjadi konflik realistis dan konflik non-realistis.

- a. Konflik Realistis, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidak sepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik.

Disini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah dialog, persuasi, musyawarah, voting, dan negosiasi. Kekuasaan dan agres sedikit sekali digunakan.

- b. Konflik Non-Realistis, yaitu konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik dipicu oleh kebencian atau prasangka, yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik, tidak penting. Hal yang penting adalah, bagaimana mengalahkan lawan. Oleh karena itu, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan. Contohnya adalah konflik karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa yang sudah menimbulkan kebencian yang mendalam.

²¹ Folger, J.P. dan M.S. Poole, 1984, *Working Through Conflict: A Communication Perspective*, Dallas, TX: Scott, Foresman and Company.

2.2.5. Konflik Konstruktif dan Konflik Destruktif

Konflik juga dapat dikelompokkan menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif²².

- a. Konflik Konstruktif, yaitu konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik.

Pihak-pihak yang terlibat konflik secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, seperti negosiasi, *give and take*, humor bahkan voting untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- b. Konflik Destruktif, yaitu pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku, karena tujuan konflik di definisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya.

Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral yang panjang, yang makin lama makin menjauhkan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik berupa kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan negosiasi untuk menciptakan *win and win solution*.

²² Loccit, Wirawan, 2009: 59

Karakteristik Konflik Konstruktif dan Konflik Destruktif

Berusaha menyelesaikan perbedaan mengenai substansi konflik	Polarisasi perbedaan dan berkurangnya kerjasama
Berhasil mendefinisikan dan mengklarifikasi permasalahan konflik	Konflik tidak berpusat pada substansi konflik
Komunikasi dan negosiasi intensif untuk menjelaskan posisi masing-masing	Perilaku merendahkan lawan konflik, mengancam, dan konfrontasi
Berupaya mengendalikan emosi, marah, kekhawatiran, dan stress	Ketegangan, kekhawatiran, stres, dan agresif
Negosiasi give and take	Negosiasi minim
Spiral konflik mengerucut ke arah kompromi atau kolaborasi	Terjadi spiral konflik yang semakin membesar dan meningkat
Berupaya mencari win and win solution yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik	Gaya manajemen konflik kompetisi dan menginginkan win and lose solution

2.2.6. Proses Konflik

Konflik merupakan proses yang berawal dari adanya sesuatu sebagai penyebab, sampai terjadinya solusi⁽²³⁾. Alur proses konflik terdiri dari beberapa fase, yaitu :

- Penyebab Konflik, pada fase ini proses penyebab konflik terjadi. Sebagai contoh, perbedaan tujuan terjadi atau tujuan sama tetapi terjadi perbedaan cara untuk mencapainya.
- Fase Laten atau fase tidak terlihat, dimana perbedaan pendapat telah terjadi, saling berbeda tujuan dan saling melaksanakan tugas yang berbenturan atau saling terkait. Akan tetapi, pihak-pihak yang terlibat konflik diam saja dan belum mengekspresikannya. Masing-masing pihak mungkin belum menyadari terjadinya konflik, masih menahan diri, atau belum menganggap hal tersebut sebagai konflik.
- Fase Pemicu, pada fase ini salah satu pihak atau kedua belah pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi itu merupakan kejadian pemicu (*triggering event*) yang

²³⁾ Ibid, 123

memicu terjadinya konflik secara terbuka. Ekspresi pertentangan dalam konflik berupa sikap, perilaku dan dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Pengekspresian ini membuat konflik menjadi terbuka dan menyadarkan masing-masing pihak akan terjadinya konflik. Dialog mengenai konflik mulai terjadi. Masing-masing pihak mencari asal-usul konflik, menentukan posisinya dalam konflik dan menentukan strategi untuk menghadapi lawan konfliknya.

- Fase Eskalasi, dimana jika fase pemicu konflik tidak terselesaikan, konflik semakin lama akan semakin membesar. Perbedaan pendapat makin tajam hingga masing-masing pihak yang terlibat konflik akan mengalami frustrasi, karena tidak dapat mencapai tujuannya akibat terhalang oleh lawan konfliknya. Masing-masing pihak mengembangkan polarisasi 'kita melawan mereka atau saya melawan dia'. Terjadilah spiral konflik yang semakin lama semakin membesar sehingga semakin menjauhkan jarak diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Sikap negatif terhadap lawan konfliknya akan semakin membesar. Masing-masing pihak merasa hanya dirinyalah yang benar dan lawannya yang salah. Kekuasaan mulai digunakan untuk mendesak posisi lawannya.
- Fase Krisis, jika fase eskalasi tidak menghasilkan solusi, konflik meningkat menjadi fase krisis. Ciri-ciri fase krisis antara lain sebagai berikut:
 - Konflik membesar dan seringkali melibatkan pihak lainnya yang memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya memperbesar kekuasaannya dengan mencari teman.
 - Perilaku pihak yang terlibat konflik tidak terkontrol karena masing-masing pihak yang terlibat konflik menjadi

irasional dan emosional. Kebencian, kemarahan dan dorongan untuk mengalahkan lawan akhirnya menguasai pikiran serta perasaan mereka.

- Norma dan peraturan sudah tidak berlaku karena masing-masing pihak menafsirkan norma dan peraturan untuk memperkuat posisinya dalam konflik.
- Salah satu pihak yang merasa kuat melakukan agresi. Bentuk agresi bisa verbal, tertulis maupun fisik atau dalam bentuk sabotase -merusak sesuatu yang berhubungan dengan lawan konflik. Apabila pihak lawannya juga merasa mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka akan membalasnya dengan agresi.
- Pihak yang terlibat konflik berusaha menghancurkan lawannya dan memenangkan konflik dengan konsekuensi apapun.

Pada fase ini mungkin terjadi salah satu fenomena berikut:

- Diantara kedua belah pihak yang terlibat konflik, tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Keduanya akan kehabisan energi. Konflik akan berhenti sementara dan kemungkinan akan terjadi kembali di kemudian hari.
- Terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga.

f. Fase Pasca Konflik, dalam fase ini bisa terjadi beberapa kemungkinan, antara lain:

- Hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik sedikit demi sedikit kembali normal dan harmonis. Keadaan ini terjadi jika resolusi konflik menghasilkan *win and win solution* sehingga kedua belah pihak merasa puas. Apabila solusi ini diikuti dengan kembalinya saling membutuhkan dan saling percaya, maka hubungan akan menjadi harmonis kembali.

- Hubungan diantara pihak yang terlibat konflik tetap regang. Hal ini terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik tidak puas terhadap solusi konflik, walaupun mereka sudah terikat dengan solusi konflik.

(2.3)

Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik sosial umumnya bersifat negatif, karena ada kecenderungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk saling bertentangan dan berusaha saling meniadakan atau melenyapkan. Dalam hal ini yang bertentangan dianggap sebagai lawan atau musuh. Di sinilah letak perbedaan konflik sosial dengan rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada saling meniadakan saingan atau kompetitor.

Dalam sosiologi, konflik sosial disebut juga pertikaian atau pertentangan. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lain. Dengan kata lain, pertikaian merupakan usaha penghapusan keberadaan pihak lain.

Menurut Soekanto²⁴⁾, pertentangan, pertikaian atau konflik sosial adalah suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia, guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik sosial diidentikkan dengan tindak kekerasan.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional serta menghambat pembangunan nasional.

2.3.1. Penyebab Konflik Sosial

Menurut Dahrendorf²⁵⁾, penyebab konflik sosial dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

a. Perbedaan Antar Orang

Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan itu mampu menimbulkan konflik sosial. Perbedaan pendirian dan perasaan setiap orang, dirasa sebagai pemicu utama dalam konflik sosial. Dari pemberitaan di media massa, banyak pertikaian terjadi karena rasa dendam, cemburu, iri hati dan sebagainya. Banyaknya perceraian keluarga merupakan salah satu bukti perbedaan prinsip mampu menimbulkan konflik. Umumnya, perbedaan pendirian atau pemikiran lahir karena setiap orang memiliki cara pandang berbeda terhadap masalah yang sama.

²⁴⁾ Soekanto, Soejono, 1989, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.

²⁵⁾ Dahrendorf, Ralf, 1988, The Modern Social Conflict: An Essay on The Politics of Liberty, Los Angeles: University of California Press.

b. Perbedaan Kebudayaan

Kebudayaan yang melekat pada seseorang mampu memunculkan konflik manakala kebudayaan-kebudayaan tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain. Pada dasarnya, pola kebudayaan yang ada memengaruhi pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kepribadian antara satu individu dengan individu lainnya berbeda-beda.

Contoh, seseorang yang tinggal di kawasan pegunungan berbeda dengan seseorang yang tinggal di pantai. Perbedaan kepribadian itu, tentunya membawa perbedaan pola pikir dan sikap dari setiap individu yang dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelompok manusia.

c. Bentrokan Kepentingan

Umumnya kepentingan merujuk pada keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal. Seseorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya, guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara dua kepentingan yang berbeda, dapat dipastikan akan muncul konflik sosial.

Contoh, benturan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Kepentingan buruh adalah mendapatkan gaji setiap bulannya. Namun, berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan, maka pihak manajemen enggan memenuhi kepentingan buruh. Akibatnya, konflik baru terbentuk antara majikan dan buruh. Buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja menuntut perusahaan tersebut.

d. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung cepat, untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendirian antar golongan dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Situasi dan kondisi ini mampu memunculkan konflik baru. Misalnya semakin maju dan tinggi teknologi, para ahli pun berusaha melibatkan balita untuk ikut menikmati teknologi tersebut yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan intelektual bayi. Karena alasan itu, dibuatlah *baby channel* yang menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.

2.3.2. Macam-Macam Konflik Sosial

Menurut Dahrendorf²⁶⁾ macam-macam konflik sosial terdiri dari lima, antara lain:

a. Konflik Pribadi

Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong orang tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Pada dasarnya konflik pribadi sering terjadi dalam masyarakat.

b. Konflik Rasial

Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Lantas, apa yang dimaksud dengan ras? Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid,

²⁶⁾ Ibid

Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antar ras dipertajam.

c. Konflik Antar Kelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah dan bawah.

Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan, berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.

d. Konflik Politik Antar Golongan Dalam Satu Masyarakat Maupun Antara Negara-negara Yang Berdaulat.

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena perbedaan itulah, peluang terjadinya konflik antar golongan terbuka lebar.

Contoh, rencana undang-undang porno aksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.

e. **Konflik Bersifat Internasional**

Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat. Pada umumnya, konflik internasional selalu berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan pada akhirnya dapat menimbulkan perang antar bangsa.

2.3.3. Akibat Konflik Sosial

Menurut Dahrendorf,⁽²⁷⁾ konflik sosial bisa berakibat, antara lain:

a. **Bertambahnya Solidaritas Anggota Kelompok yang Berkonflik.**

Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka solidaritas antar anggota kelompok tersebut akan meningkat dan bertambah erat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.

b. **Jika Konflik Terjadi Dalam Suatu Kelompok, Akan Menjadikan Keretakan dan Keguncangan Pada Kelompok Tersebut.**

Visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak dipandang lagi sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama, sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.

²⁷⁾ Ibid

c. **Berubahnya Kepribadian Individu.**

Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental.

Keadaan seperti itu dialami oleh orang-orang yang lama tinggal di Amerika Serikat. Sewaktu Amerika Serikat diserang mendadak oleh Jepang pada Perang Dunia II, orang-orang Jepang yang lahir di Amerika atau yang telah lama tinggal di sana sehingga mengambil kewarga negaraan setempat, merasakan tekanan-tekanan tersebut.

Kondisi ini mereka alami karena kebudayaan Jepang masih merupakan bagian dari hidupnya dan banyak pula saudaranya yang tinggal di Jepang. Sehingga mereka pada umumnya, tidak dapat membenci Kerajaan Jepang seratus persen seperti orang-orang Amerika asli.

d. **Hancurnya Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa.**

Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berkonflik, akan mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian.

Oleh karena itu, tidak urung segala sesuatu yang ada disekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa, wujud nyata dari akibat konflik.

e. Akomodasi, Dominasi dan Takluknya Salah Satu Pihak.

Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan.

Ketidak seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi, sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya.

(2.4)

Teknik Pemetaan Konflik

Dalam melakukan pemetaan konflik, diperlukan teknik yang terstruktur sehingga mudah untuk melakukan pemetaan, khususnya konflik di suatu daerah. Adapun teknik pemetaan yang digunakan adalah teknik SIPABIO²⁸ yaitu singkatan dari *Source, Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention*, dan *Outcome*.

a. Sumber Konflik (*Source*)

Konflik yang disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda yang melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Hal ini bisa berasal dari model hubungan sosial dalam analisis konstruksi sosial. Nilai-nilai seperti suku, agama, budaya, latar belakang ekonomi yang berbeda, yang bisa memicu lahirnya sebuah konflik.

²⁸⁾ Amr, Abdalla, 2009, Understanding C.R SIPABIO: A Conflict Analysis Model, Virginia USA: The Graduate School of Islamic and Social Sciences.

b. Isu (*Issue*)

Adanya tujuan-tujuan yang tidak sejalan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Isu ini bisa terjadi oleh semua pihak, yang sebelumnya tidak diketahui tentang sumber. sumber konflik yang sedang terjadi.

c. Pihak-Pihak yang berkonflik (*Parties*)

Pihak yang berkonflik merupakan kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, maupun pihak konflik sekunder yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan serta pihak tersier yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini acap kali dijadikan sebagai pihak yang netral untuk melakukan intervensi terhadap konflik yang sedang berlangsung.

d. Sikap (*Attitudes*)

Yaitu perasaan, persepsi, paradigma, cara berpikir, pandangan yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap itu bisa saja berbentuk hal yang baik dan positif, ataupun sebaliknya yaitu tidak baik dan negatif bagi konflik.

e. Perilaku (*Behavior*)

Perilaku yang dimaksud merupakan aspek tindakan sosial dari pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku itu dapat muncul berupa tindakan yang memaksa dalam situasi konflik dan dapat juga muncul berupa tindakan yang bersifat persuasif.

f. Intervensi (*Intervention*)

Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya campur tangan atau adanya kekuatan dari pihak lain yang tidak berkonflik. Pihak lain adalah pihak netral yang berupaya terlibat dalam penyelesaian konflik.

g. Hasil Akhir (*Outcome*)

Hasil akhir dari suatu konflik atau dampak apa saja yang terjadi, sebagai akibat dari terjadinya konflik. Dampak ini dapat berupa situasi yang terjadi pasca penyelesaian konflik ataupun pasca terjadinya konflik.

BAB III

METODE PENELITIAN

(3.1)

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dapat ditunjukkan tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, sejarah, tingkah laku, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa metode penelitian digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami⁽²⁹⁾.

Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk membuat dan menyusun konsep-konsep yang hakiki, yang tidak ditemukan dalam metode yang lainnya⁽³⁰⁾.

²⁹⁾ Strauss & Corbin. Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques (Newbury Park : Sage publication, 1990).

³⁰⁾ Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).

Selain itu, penelitian kualitatif sangat sesuai dengan tipe-tipe informasi. Yaitu untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, deskripsi latar dan interaksi yang kompleks, memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci, mendiskripsikan fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya, terfokus pada interaksi dan proses-proses yang mereka gunakan.

Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini juga dirancang secara luwes. Lincoln dan Guba menyebutnya sebagai *emergent design*³¹⁾, sehingga rancangannya dapat berkembang dan terbuka sesuai dengan kondisi lapangan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan *social mapping* (pemetaan sosial), yaitu metode penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pemetaan sosial di sini dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dan interaksi antar manusia, dalam konteks masyarakat atau komunitas yang bersifat abstrak, yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat.

Oleh karenanya, pemetaan sosial ini harus mencakup lebih dari seorang individu. Berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, manusia diatur hak dan kewajibannya dalam sebuah arena yang sering disebut sebagai status, bagaimana individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ada dalam perangkat pedoman sebagai acuan³²⁾.

³¹⁾ Lincoln and Denzin, Norman ed. *Handbook Of Qualitatif Research*, second edition (London: Sage Publication, 2002), Hlm. 44.

³²⁾ Rudito, Bambang dan Melloa Famiola, *Social Mapping Metode Pemetaan Sosial* (Penerbit Rekayasa Sains) Hal. 32-33

Desain kualitatif memiliki derajat asumsi subjektif tentang hakikat pengalaman nyata dari tatanan sosial dan politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edmund Husserl yang menyebutkan bahwa sebuah pengetahuan selalu berpijak pada yang eksperiensial (bersifat pengalaman) dari fenomena-fenomena yang menyertainya. Husserl berpendapat bahwa, kesadaran manusia secara aktif mengandung objek-objek pengalaman. Dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode *social mapping*, akan dapat mencermati pemetaan potensi konflik di sebuah wilayah.

Penelitian ini menggali dan memberikan pemetaan terhadap potensi konflik di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyebab terjadinya konflik dan hal apa saja yang memungkinkan menjadi potensi konflik di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Fakta bahwa konflik sosial pada masyarakat pluralis seperti Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi sebuah dinamika yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemetaan terhadap potensi konflik menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penelitian secara komprehensif.

Oleh karena itu, desain kualitatif dengan metode *social mapping* akan sangat membantu untuk melakukan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik yang terjadi Kabupaten Tanah Bumbu.

* * *

(3.2)

Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Tetapi sebelum mengumpulkan data primer dan sekunder, terlebih dahulu dilakukan observasi untuk mengetahui dan memahami lokasi serta subjek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari informan dengan melakukan wawancara mendalam (*indept interview*).

Informan itu sendiri terdiri dari dari beberapa unsur, yaitu :

1. Tokoh Masyarakat dari berbagai kecamatan,
2. Tokoh Agama,
3. Tokoh Adat,
4. Pemerintah daerah, antara lain Kesbangpol, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PMD serta Kementerian Agama,

5. Anggota DPRD,
6. Penyelenggara Pemilu,
7. Aparat penegak hukum,
8. Pengamat politik lokal yang dianggap kompeten dalam kajian ini, dan
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Data sekunder berasal dari studi literatur dengan menggali informasi melalui dokumen-dokumen, seperti dokumen yang berhubungan dengan gambaran umum informasi kebijakan publik dan pemetaan potensi konflik di Tanah Bumbu tahun 2015.

Selain itu data juga diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan hasil penelitian sebelumnya. Bahan tambahan, diambil dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari penelusuran melalui internet, pada akun-akun yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3.3)

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada para informan menggunakan pedoman wawancara. Teknik penetapan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling*. Artinya, peneliti menetapkan terlebih dahulu beberapa informan kunci, selanjutnya informan yang berikutnya akan diwawancarai mengalir sesuai dengan informasi yang didapat dari informan kunci awal.

Selain itu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Foccus Group Discussion* (FGD). Yaitu mengumpulkan para tokoh kunci di masyarakat untuk dimintai pendapat atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan kelengkapan data penelitian.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode *social mapping* dalam

menganalisis dan menjelaskan pemetaan potensi konflik secara terperinci metode analisis data yang digunakan adalah dengan prosedur atau proses berikut ini:

Pertama, Pemberian Nama Fenomena, yaitu setiap peneliti dapat menghitung data mentah, namun agar cukup berarti maka dibutuhkan konseptualisasi data sebagai langkah awal analisis. Melalui konseptualisasi data, maka suatu peristiwa telah ditetapkan secara kongkret, ide, atau peristiwa, nama, sesuatu yang mewakili fenomena.

Kedua, Kategori Penemuan, yaitu pada awalnya akan banyak konsep yang masuk selama proses wawancara. Untuk itu konsep ini harus dikategorikan atau dikelompokkan. Proses pengelompokkan konsep-konsep tersebut tampaknya juga menyinggung fenomena yang sama, yaitu "mengkategorikan". Fenomena itu diwakili oleh sebuah kategori yang diberi nama konsep, tetapi nama ini lebih abstrak dari yang diberikan pada konsep-konsep yang dikelompokkan menurut fenomena. Kategorisasi mewakili kekuatan konsep, sebab kategori itu mampu untuk memenuhi kelompok-kelompok konsep atau sub-sub kategori.

Ketiga, Pemberian Nama suatu Kategori, yaitu setelah ditetapkan kategori yang dipakai, maka akan sangat penting untuk menggunakan pemberian nama dari kategori-kategori tersebut. Untuk menamakannya, maka sumber penting yang didapatkan adalah melalui kata-kata dan kalimat yang dipergunakan sebagai sumber informasi yang mudah di ingat dengan segera mengenai penjelasan gambaran anda kepada mereka. Istilah yang seringkali dipakai dalam metode ini disebut dengan kode "in vivo"³³

* * *

³³) Loc.cit, Strauss & Corbin, hal. 65-72

(3.4)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kusan Hilir
2. Kecamatan Sungai Loban
3. Kecamatan Satui
4. Kecamatan Angsana
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Kuranji
7. Kecamatan Batulicin
8. Kecamatan Karang Bintang
9. Kecamatan Simpang Empat
10. Kecamatan Matewe

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan permintaan pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan kondisi riil Kabupaten Tanah Bumbu. Juga berdasarkan pertimbangan representatif pemetaan konflik tahun sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun anggaran September 2016 hingga Juli 2017, penelitian ini berlangsung selama 11 (sebelas) bulan. Diawali dengan data pendukung pemetaan konflik tahun 2015. Pengambilan data baik primer maupun sekunder berlangsung cukup lama, sebagaimana tergambar dalam **Tabel 3.1**, berikut ini:

JADWAL KEGIATAN DAN TAHAPAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN KEGIATAN	2016												2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN TIM																								
	1. Pengurusan Administrasi	X																							
	2. Koordinasi Tim CEPP	X	X																						
	3. Penyusunan Instrumen Penelitian			X																					
	4. Tim ke Lokasi Penelitian				X	X																			
II.	PELAKSANAAN PENELITIAN																								
	1. Pengumpulan Data				X	X	X	X																	
	2. Analisa Data															X	X								
	3. Monitoring/Evaluasi																X								
	3. Penyusunan Draft Laporan																				X				
	4. Seminar																				X				
III.	PEMBUATAN LAPORAN AKHIR																							X	

Tabel 3.1. Timeline Penelitian

(3.5)

Pelaksanaan dan Sumber Pembiayaan

Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kab Tanah Bumbu dengan Universitas Lambung Mangkurat di bawah *Center for Election and Political Party University Link* (CEPP ULM). Penelitian ini menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kab Tanah Bumbu tahun Anggaran 2016.

CEPP ULM merupakan pusat kajian yang berdiri pada tahun 2013 dan berada dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. CEPP ULM bergerak di bidang kajian kepemiluan, isu-isu politik, isu-isu sosial dan isu-isu pembangunan.

(3.6)

Luran Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa Pemetaan Wilayah Potensi Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini juga akan merekomendasikan beberapa resolusi konflik terkait potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

* * *

(3.7)

Kendala Penelitian

Kendala yang dihadapi selama proses penelitian ini antara lain:

1. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga dalam proses pengumpulan data tidak bisa dilakukan dengan cakupan seluruh desa di tiap kecamatan.
2. Adanya kekhawatiran warga dalam menyampaikan informasi terkait keamanan, hal ini dikarenakan tema penelitian ini adalah tentang konflik yang dipandang sensitif untuk dibicarakan.

* * *

(3.8)

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Tinjauan Pustaka
- Bab III Metode Penelitian
- Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- Bab V Persebaran Potensi Konflik
- Bab VI Pemetaan Wilayah Potensi Konflik
- Bab VII Penutup

* * *

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

(4.1)

Penjelasan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu adalah satu dari 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.

Tanah Bumbu resmi memisahkan diri dari Kotabaru pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 8 April, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak diantara 2°52' – 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' – 116°04' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan dengan ;

Sebelah Utara dan Timur	: Kabupaten Kotabaru.
Sebelah Selatan	: Laut Jawa.
Sebelah Barat	: Kabupaten Banjar dan Tanah Laut.

Ibukota Tanah Bumbu terletak di Kota Batulicin, tepatnya di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah Kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 10 kecamatan, yaitu Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe, Kuranji dan Angsana. Lima kecamatan terakhir yang disebutkan adalah hasil pemekaran pada pertengahan 2005 lalu.

(4.2)

Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.076,14 km² (506.714 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 31,76 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebaliknya, Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil mencakup 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

Luas wilayah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kusan Hilir	401,54	7,92	49.349	122,90
2	Sungai Loban	358,41	7,07	21.999	61,38
3	Satui	876,58	17,30	59.081	67,40
4	Angsana	151,54	2,99	19.097	126,02
5	Kusan Hulu	1.609,39	31,76	20.547	12,77
6	Kuranji	110,42	2,18	10.198	92,51
7	Batulicin	127,71	2,52	16.374	128,21
8	Karang Bintang	118,02	2,33	18.594	157,55
9	Simpang Empat	302,32	5,97	80.830	267,37
10	Mantewe	1.011,21	19,96	19.746	19,53
	Tanah Bumbu	5.067,14	100,00	315.815	62,33
	Kalimantan Selatan	37.530,52	13,50	-	-

Tabel 4.1. Sumber: Buku Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

Kemudian luas areal di Kabupaten Tanah Bumbu menurut penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

Luas Areal Menurut Penggunaannya di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas Areal (Ha)	Persentase
1	Kampung	7.831	1,54
2	Industri	820	0,16
3	pertambangan	1.600	0,32
4	Sawah	14.600	2,88
5	Pertanian	1.810	0,36
6	Kebun Campuran	40.321	7,95
7	Perkebunan	42.380	8,36
8	Padang (Semak, Alang, Rumput)	65.439	12,91
9	Hutan	319.470	63,01
10	Perairan Darat	932	0,18
11	Tanah Terbuka	98	0,02
12	Lain-lain	11.700	2,31
	jumlah	507.001	100

Tabel 4.2. Sumber : Buku Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

(4.3)

Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 267.929 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir.

Tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 325.115 atau naik sekitar 2,94 persen.

Kota terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan kepadatan penduduknya adalah Batulicin di Kecamatan Simpang Empat. Kemudian di ikuti kota-kota lainnya seperti Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir dan Sungai Danau di Kecamatan Satui.

Adapun jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk apabila dilihat berdasarkan kecamatan masing-masing adalah sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015**

Kecamatan		Jumlah penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010 - 2015	2014 - 2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kusan Hilir	42,681	49,349	50,649	3.48	2.63
2	Sungai Loban	19,007	21,999	22,583	3.51	2.65
3	Satui	49,689	59,081	61,030	4.20	3.30
4	Angsana	16,462	19,097	19,613	3.56	2.70
5	Kusan Hulu	17,878	20,547	21,048	3.32	2.44
6	Kuranji	8,792	10,198	10,476	3.57	2.73
7	Batulicin	13,966	16,374	16,862	3.84	2.98
8	Karang Bintang	16,007	18,594	19,108	3.61	2.76
9	Simpang Empat	68,042	80,830	83,475	4.17	3.27
10	Mantewe	17,057	19,746	20,271	3.51	2.66
	Tanah Bumbu	269,581	315,815	325,115	3.82	2.94

Tabel 4.3. Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2014 - 2015 adalah di kecamatan Simpang Empat, yaitu sebesar 3,27%.

Kemudian berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin di tiap-tiap kecamatan :

**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015**

Kecamatan		Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kusan Hilir	26,182	24,467	50,649	107.01
2	Sungai Loban	11,916	10,667	22,583	111.71
3	Satui	32,968	28,062	61,030	117.48
4	Angsana	10,468	9,145	19,613	114.47
5	Kusan Hulu	11,212	9,836	21,048	113.99
6	Kuranji	5,605	4,871	10,476	115.07
7	Batulicin	8,875	7,987	16,862	111.12
8	Karang Bintang	10,284	8,824	19,108	116.55
9	Simpang Empat	40,912	42,563	83,475	96.12
10	Mantewe	10,945	9,326	20,271	117.36
	Tanah Bumbu	169,367	155,748	325,115	108.74

Tabel 4.4. Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Selanjutnya berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu.

**Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	19,623	19,069	38,692
5-9	16,900	16,065	32,965
10-14	14,350	13,680	28,030
15-19	13,523	12,952	26,475
20-24	14,031	14,070	28,101
25-29	16,261	15,206	31,467
30-34	15,352	13,993	29,345
35-39	14,092	12,537	26,629
40-44	12,298	10,379	22,677
45-49	9,830	8,225	18,085
50-54	7,704	6,661	14,365
55-59	5,994	4,889	10,883
60-64	4,067	3,064	7,131
65+	5,342	4,928	10,270
Jumlah	169,367	155,748	325,115

Tabel 4.5

Dalam melihat persoalan kependudukan, maka tidak dapat lepas dari persoalan pembangunan manusia beserta komponen-komponen yang tercakup di dalamnya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

**Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015**

	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan/ Unit
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Angka Harapan Hidup	68,55	68,66	68,76	68,81	68,84	69,19	Tahun
2.	Harapan Lama Sekolah (EYS)	10,37	10,73	10,84	10,95	11,20	11,42	Persen
3.	Rata2 Lama Sekolah	6,69	6,77	7,04	7,21	7,26	7,38	Tahun
4.	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	10.602	10.611	10.619	10.628	10.697	10.781	Ribu Rupiah
5.	IPM	64,98	65,59	66,13	66,51	66,94	67,58	
6.	Peringkat IPM							
a.	Dalam Provinsi	4	4	4	4	5	5	
b.	Nasional							

Tabel 4.6

(4.4)

Mata Pencanharian

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu di dominasi oleh bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yaitu sebesar 52.734.

Berikut tabel rincian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin :

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kelamin**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	38,970	13,764	52,734
2	15,836	1,162	16,998
3	3,684	1,574	5,258

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	0	0	0
5	7,365	0	7,365
6	13,224	15,686	28,910
7	4,133	0	4,133
8	1,333	728	2,061
9	11,808	9,928	21,736
Jumlah	96,353	42,842	139,195

Tabel 4.7. Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Keterangan :

1. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

(4.5)

Sektor Perkebunan

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagian besar tanah kering di kabupaten ini dimanfaatkan sebagai area perkebunan. Perkebunan tersebut meliputi perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa, dan komoditi perkebunan lainnya.

Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dapat dilihat pada produksi kelapa sawit pada tahun 2014 yang mencapai 1.040,9 ribu ton dan merupakan produksi tertinggi di atas karet (18,7 ribu ton), kelapa (1,9 ribu ton) dan komoditas perkebunan lainnya (0,2 ton).

Dilihat dari kepemilikan lahan, sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan swasta besar. Pada tahun 2014, perusahaan swasta besar mampu memproduksi sekitar 629 ribu ton dibandingkan dengan perkebunan rakyat yang hanya mampu memproduksi sekitar 412 ribu ton. Akan tetapi, produksi

pada lahan kelapa sawit milik perusahaan besar cenderung lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan perkebunan milik rakyat.

Jika kita melihat perkebunan yang dimiliki oleh rakyat maka tiga kecamatan dengan lahan kelapa sawit milik rakyat terluas yaitu Kecamatan Satui (8241 Ha), kemudian di Kecamatan Sungai Loban (6010 Ha), dan Kecamatan Kusan Hulu (5375 Ha). Lalu, Kecamatan Simpang Empat dan Batulicin memiliki luas yang tersempit.

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No	Tanaman Perkebunan	Luas Area (Ha)			Jumlah
		TBM	TM	Tua / Rusak	
1	Karet	6.585	18.638	50	25.273
2	Kelapa sawit	13.790	57.579	10	71.379
3	Kelapa hibrida	-	100	-	100
4	Kelapa	408	2.797	90	3.295
5	Kopi	99	113	-	212
6	Kakao	27	38	15	80
7	Lada	23	22	1	46
8	Cengkeh	-	4	2	6
9	Kemiri	11	7	-	18
10	Sagu	32	42	3	77
11	Aren	6	23	-	29
12	Vanili	-	-	-	-
13	Tebu	-	-	-	-
14	pinang	11	10	-	21

Tabel 4.8. Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelapa sawit merupakan jenis usaha perkebunan yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat Tanah Bumbu dengan luas areal 25.273 Ha, berada diatas usaha perkebunan karet dengan luas areal 25.379 Ha. Hal tersebut sejalan dengan tingkat produksi kelapa sawit yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas komoditi perkebunan lainnya.

(4.6)

Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kawasan hutan, yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 per keseluruhan wilayah. Kawasan hutan terbagi atas Hutan dan Hutan Produksi, yang sebagian dapat dibudi dayakan sebarannya terletak dibagian utara dan barat laut dari Bumbu.

Berdasarkan data administrasi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki enam lokasi K Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), masing-masing di:

1. Kecamatan Satui
2. Kecamatan Angsana
3. Kecamatan Sungai Loban
4. Kecamatan Mentewe
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Simpang Empat

pada lahan kelapa sawit milik perusahaan besar cenderung lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan perkebunan milik rakyat.

Jika kita melihat perkebunan yang dimiliki oleh rakyat maka tiga kecamatan dengan lahan kelapa sawit milik rakyat terluas yaitu Kecamatan Satui (8241 Ha), kemudian di Kecamatan Sungai Loban (6010 Ha), dan Kecamatan Kusan Hulu (5375 Ha). Lalu, Kecamatan Simpang Empat dan Batulicin memiliki luas yang tersempit.

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

No	Tanaman Perkebunan	Luas Area (Ha)			Jumlah
		TBM	TM	Tua / Rusak	
1	Karet	6.585	18.638	50	25.273
2	Kelapa sawit	13.790	57.579	10	71.379
3	Kelapa hibrida	-	100	-	100
4	Kelapa	408	2.797	90	3.295
5	Kopi	99	113	-	212
6	Kakao	27	38	15	80
7	Lada	23	22	1	46
8	Cengkeh	-	4	2	6
9	Kemiri	11	7	-	18
10	Sagu	32	42	3	77
11	Aren	6	23	-	29
12	Vanili	-	-	-	-
13	Tebu	-	-	-	-
14	pinang	11	10	-	21

Tabel 4.8. Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelapa sawit merupakan jenis usaha perkebunan yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat Tanah Bumbu dengan luas areal 25.273 Ha, berada diatas usaha perkebunan karet dengan luas areal 25.379 Ha. Hal tersebut sejalan dengan tingkat produksi kelapa sawit yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas komoditi perkebunan lainnya.

(4.6)

Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kawasan hutan, yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 persen dari keseluruhan wilayah. Kawasan hutan terbagi atas Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang sebagian dapat dibudi dayakan. Lokasi sebarannya terletak dibagian utara dan barat laut dari Tanah Bumbu.

Berdasarkan data administrasi pemerintah daerah setempat, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki enam lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), masing-masing di:

1. Kecamatan Satui
2. Kecamatan Angsana
3. Kecamatan Sungai Loban
4. Kecamatan Mentewe
5. Kecamatan Kusan Hulu
6. Kecamatan Simpang Empat

Tabel 4.9
Fungsi Kawasan Hutan KPHP Tanah Bumbu

KPHP Tanah Bumbu	FUNGSI			
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	JUMLAH
Resort Kphp Satui		14,525	70,035	84,560
Resort Kphp Kusan	4,191	9,909	72,977	87,077
Resort Kphi Meratus	78,997	594	2,500	82,091
Grand Total	83,188	25,028	145,512	253,728

Sumber: kphptanahbumbuunitvi.blogspot.co.id.
Data upload 19 April 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari kawasan hutan di Tanah Bumbu merupakan hutan produksi. Kondisi tersebut membuat masyarakat Tanah Bumbu memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya pemanfaatan hasil hutan yang bernilai ekonomis. Hutan produksi berdasarkan penggunaannya terbagi lagi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dengan jumlah luasan lebih besar.

* * *

(4.7)

Perikanan dan Kelautan

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu menjadikan sektor perikanan memiliki nilai yang cukup strategis dalam peta perekonomian daerah maupun antar kabupaten. Semua kecamatan di Tanah Bumbu minimal memiliki salah satu potensi perikanan (perairan laut, perairan umum dan budi daya).

Di tahun 2014, kecamatan yang memiliki tingkat produksi perikanan terbanyak adalah Kusan Hilir yang mampu menyumbang 18.518,36 Ton. Sedangkan total produksi perikanan di Tanah Bumbu sendiri sebesar 46.648,14 Ton. Dari jumlah itu, 88 persen di antaranya merupakan produksi perikanan laut.

Usaha perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar masih dilakukan secara tradisional. Dalam usaha penangkapan ikan, areal penangkapan masih berada di wilayah 3 mil laut. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara

nasional, khususnya Bidang Perikanan Tangkap. Potensi penangkapan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang 158,7 km yang terbentang dari Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarganya, fokus pengembangan adalah melalui peningkatan produktivitas hasil tangkapan.

Tabel 4.10
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

No	Kegiatan Perikanan Tangkap	Jumlah (Ton)
1.	Perairan Laut	38.597,42
2.	Perairan Umum	2.665,97
Jumlah		41.263,394

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan budi daya air tawar (kolam, keramba, jaring apung) dan budi daya air payau (tambak), seperti terlihat pada tabel berikut, dimana tingkat produktivitasnya mencapai 2.373,4 ton.

Tabel 4.11; Jumlah Produksi Budi Daya Tahun 2015

No	Kegiatan Budi Daya	Jumlah (Ton)
1	Tambak	1.414,5
2	Kolam	837,7
3	Keramba	5,2
4	Jaring Apung	116
Jumlah		2.373,4

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021

Budi daya air tawar mencakup lahan seluas 6.092,92 Ha dan sudah tergarap seluas 34,44 Ha. Sedangkan budi daya air payau mencakup lahan seluas 13.098,00 Ha dan sudah digarap seluas 3.457 Ha. Potensi budi daya ikan air tawar terdapat di daerah aliran sungai dan tandon/cekdam, dengan memanfaatkan sisi sungai yang potensial untuk pengembangan budi daya ikan.

(1.1)

Ekonomi

Selama empat tahun terakhir, sejak tahun 2011-2014, perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami perlambatan. Sempat mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 7,9 persen di tahun 2011, kemudian di tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu terus menurun hingga 3,6 persen di tahun 2014. Meskipun secara nominal atas dasar harga berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan, namun apabila dilihat penambahan nilainya atas dasar harga konstan mengalami perlambatan mulai dari tahun 2012.

Pada tahun 2011, peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai 838 milyar rupiah, kemudian tahun 2012 mencapai 719 milyar, dan seterusnya hingga tahun 2013 dan 2014 terus menurun, masing-masing mengalami penambahan nilai sebesar 462 milyar dan 458 milyar rupiah. Penambahan nilai yang makin menurun ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi

Tanah Bumbu mengalami perlambatan selama empat tahun terakhir.

Salah satu mengapa hal ini terjadi adalah menurunnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan sektor utama penopang terbesar perekonomian Tanah Bumbu. Kinerja kategori pertambangan dan penggalian di Kabupaten Tanah Bumbu sesungguhnya sangat tergantung pada kondisi perekonomian global, karena komoditas yang dihasilkan adalah batu bara sebagai komoditas unggulan ekspor. Dengan kata lain, produksi batu bara Tanah Bumbu sangat tergantung pada *demand* di negara tujuan ekspornya.

Negara tujuan utama ekspor batu bara adalah Tiongkok, Jepang dan India. Kondisi perekonomian negara Tiongkok selama beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, demikian juga India dan Jepang sehingga menyebabkan *demand* batu bara dari negara tersebut mengalami penurunan.

Kelesuan ekonomi global yang mulai dirasakan di akhir tahun 2013 terus berlanjut sampai 2015, ikut memperparah kondisi perdagangan Indonesia dan tentunya juga Tanah Bumbu. Negara destinasi ekspor sumber daya alam turut terimbas yang berimplikasi pada penurunan kapasitas produksi sehingga bahan baku dari Indonesia juga semakin susah diserap pasar dunia.

Lesunya pasar batu bara dunia juga diperparah dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara di negara lain yang mendorong bergesernya kurva penawaran batu bara di pasar dunia. Dampak ekonominya tentu saja menjadikan harga batu bara di pasar dunia terus merosot akibat mekanisme pasar. Bahkan tercatat harga batu bara mencapai titik yang cukup rendah yaitu sekitar 60 US \$ / ton. Kondisi ini yang terus menerus menghantam kegiatan pertambangan batu bara.

Menurut para pelaku bisnis ini, dengan biaya produksi yang tidak bisa ditekan sementara harga produk yang tidak bersaing

menyebabkan banyak usaha pertambangan yang memilih untuk tidak beroperasi. Beberapa perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, masih terbantu dan bisa beroperasi meskipun dengan margin ekonomi yang bisa jadi semakin tipis.

Dilihat dari struktur ekonominya, kategori primer yaitu kategori pertanian dan kategori pertambangan dan penggalian masih dominan sebagai penyumbang nilai PDRB di Kabupaten Tanah Bumbu. Separuh lebih nilai tambah perekonomian diciptakan dari dua kategori tersebut. Terlihat bahwa untuk kategori primer, khususnya pertanian, mempunyai peranan sebesar 15,8 persen dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 46,1 persen.

Dominasi yang tidak seimbang ini menyebabkan ketergantungan ekonomi regional terhadap kategori tersebut sangat besar. Dalam kaitan ini, akan mudah melihat ekonomi Tanah Bumbu hanya dengan mengacu pada kedua kategori tersebut.

* * *

(4.9)

Politik

Pemerintah Tanah Bumbu dari legislatif direpresentasikan oleh DPRD. 2014 merupakan tahun pertama kerja bagi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2014 – 2019, dipilih melalui pemilihan anggota legislatif di tahun 2014. Terdapat 35 orang yang terpilih menduduki kursi DPRD dari berbagai partai. Tiga di antaranya adalah wanita yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (Nasdem).

PDI Perjuangan tercatat sebagai partai penyumbang anggotanya terbanyak, yakni sepuluh orang atau menguasai 28,75% kursi di dewan. Selanjutnya, PKB dan Gerindra sama-sama menyumbang lima anggotanya duduk di dewan. Gabungan ketiga partai menguasai lebih dari separuh kursi dewan Tanah Bumbu. Sisanya diisi oleh partai Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PAN, Demokrat PKS. PKS dan Demokrat adalah partai dengan jumlah kursi sedikit yakni masing-masing satu kursi. ***

(4.10)

Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka akan meningkat juga kebutuhan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Adanya akses jalan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan aktifitas ekonomi. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014 adalah 1.031,2 km dengan rincian 129.4 km merupakan jalan negara, 99.8 km adalah jalan Propinsi dan 784 km adalah jalan kabupaten. Keadaan pada tahun 2014, jalan yang beraspal sepanjang 237,595 km, jalan kerikil sepanjang 445,721 km dan jalan tanah sepanjang 96.440 km.

Dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu, 352,220 km berkondisi baik; 176,340 km berkondisi sedang,

229,591 km berkondisi rusak dan 52,849 km berkondisi rusak berat. Jika dipersentasikan, maka jalan rusak dan rusak berat di Tanah Bumbu adalah sebesar 36,02 persen.

Dengan melihat keadaan seperti itu, sudah selayaknya di masa mendatang pembenahan di bidang infra struktur jalan menjadi prioritas. Diharapkan, dengan bagus nya jalan akan memperlancar aktivitas perekonomian baik hubungan Banjarmasin sebagai pusat perekonomian Propinsi Kalimantan Selatan dengan Batulicin, maupun antara Batulicin sebagai pusat perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dengan kecamatan lainnya.

Jika jalan dipisahkan oleh sungai atau aliran air lainnya, maka untuk menghubungkan jalan tersebut diperlukan jembatan. Kalimantan dikenal dengan banyaknya sungai, sehingga tidak heran di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat banyak jembatan, yang mencapai 778 buah.

Dari jumlah itu, sebanyak 275 jembatan dengan konstruksi beton, 8 jembatan besi, 490 jembatan kayu serta 5 jembatan selain ketiga jenis tersebut. Jumlah jembatan terbanyak terdapat di Kecamatan Satui dengan total 170 buah jembatan. Sebaliknya, kecamatan Batulicin hanya memiliki 19 buah jembatan.

(4.11)

Sosial Budaya

a. Pendidikan

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Penduduk yang berkualitas akan menjadi penggerak arah pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai penduduk yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, salah satunya ditunjang dengan ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan, diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, terutama pada penduduk usia wajib sekolah 7-18 tahun, untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu sampai tahun 2014 antara lain 195 buah sekolah TK; 192 buah SD; 56 buah SMP; 18 buah SMA serta 15 buah SMK.

Jumlah Anak yang bersekolah di tingkat SD lebih banyak dibandingkan pada jenjang sekolah lain. Di tingkat SD jumlah murid sebanyak 35.288 siswa, ditingkat SMP 10.541 siswa, tingkat SMU dan SMK masing-masing sebanyak 3.413 dan 4.805 orang siswa.

Jumlah anak sekolah pada jenjang dibawahnya, kemungkinan adanya anak yang mengalami putus sekolah. Resiko paling besar adalah pada jenjang SD. Hal itu bisa dilihat pada penurunan yang cukup signifikan siswa SD ke siswa SMP.

Di samping itu, terdapat sarana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2013 tercatat ada 4 (empat) Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, 14 Madrasah Ibtidaiyah, 24 Madrasah Tsanawiyah dan 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, sehingga diharapkan tercapai Tanah Bumbu yang sehat dan sejahtera. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat mempengaruhi aspek pelayanan kesehatan yang dimaksud.

Selain sebuah RSUD, di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat terdapat 4 Puskesmas Perawat, 10 buah Puskesmas Non Perawat, 108 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 187 Posyandu Balita yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Selain itu dilengkapi pula dengan mobil Puskesmas keliling, Pos Bersalin Desa (Polindes).

Di samping penyediaan sarana kesehatan yang memadai, diperlukan pula tenaga medis yang handal untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 35

dokter umum dan 7 orang dokter gigi yang bertugas di Tanah Bumbu. Ketersediaan tenaga kesehatan profesional itu, dibantu tenaga penunjang kesehatan lainnya, yakni 187 perawat, 260 bidan dan 217 dukun kampung / bayi.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Bumbu yang sekarang bernama RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, adalah rumah sakit milik pemerintah daerah setempat yang melayani masyarakat umum. Jenis penyakit terbanyak yang di diagnosis terhadap pasien di rumah sakit itu selama tahun 2014 adalah Low Back Pain dan Dyspepsia, yakni sebanyak 1.259 dan 1.254 kasus.

c. Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2014 tercatat ada sebanyak 64.136 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan jumlah akseptor KB yang Aktif sebanyak 50.483 orang. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan akseptor KB adalah pil. Alat kontrasepsi jenis pil digunakan oleh 24.216 akseptor. Kemudian suntik KB oleh 19.382 akseptor. Banyaknya pil KB yang dipilih disebabkan penggunaannya yang lebih praktis dan harga yang relatif murah dibanding dengan alat kontrasepsi yang lain.

d. Agama

Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat agamis yang harmonis, saling toleransi dan bekerja sama sehingga mendukung laju pembangunan.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut di atas diperlukan sarana ibadah untuk memupuk keimanan sesuai dengan agama masing-masing.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Bumbu beragama Islam, selebihnya adalah Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sarana beribadah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu antara lain 206 buah Masjid, 372 buah Mushola / Langgar, 7 buah Gereja dan 21 Pura.

e. Hukum dan Keamanan

Dari aspek hukum, Pengadilan Agama Batulicin mencatat jenis perkara (yang berasal dari masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu) terbanyak yang masuk pada tahun 2014 adalah kasus gugat cerai talak sebanyak 434 perkara dan gugatan cerai talak sebanyak 150 perkara. Sebanyak 264 kasus gugat cerai telah diselesaikan pada tahun 2013.

Sepanjang tahun 2014, Kepolisian Resort Tanah Bumbu mencatat kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum setempat sebanyak 49 kejadian dengan kerugian material sekitar Rp.364.000.000,00. Selain mengakibatkan kerugian material, juga menimbulkan kerugian immaterial dengan 47 orang korban meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 16 orang luka ringan.

Untuk membangun disiplin berlalu lintas di jalan raya, Polres Tanah Bumbu telah menindak pelanggar lalu lintas. Hasilnya, 3.062 pelanggaran lalu lintas terjaring selama tahun 2014. Pelanggaran paling sering terjadi pada bulan September, sebanyak 376 pelanggaran.

f. Suku

Penduduk yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari berbagai suku, namun yang menjadi mayoritas adalah suku Banjar dan Bugis. Suku lain seperti suku Jawa, Sunda, Mandar, Dayak, Batak Madura, Lombok, Bali dan lain sebagainya.

Secara umum, berdasarkan jumlahnya, sebaran dan tempat tinggal suku-suku di wilayah Tanah Bumbu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Suku Banjar, umumnya berdomisili di Batulicin, Simpang Empat dan Satui.
2. Suku Dayak Bukit, umumnya berdomisili di daerah pegunungan Meratus, Satui dan Mantewe serta Kusan Hulu.
3. Suku Bugis, umumnya berdomisili di Pagatan dan Batulicin.
4. Suku Mandar, umumnya berdomisili di Pagatan dan Batulicin.
5. Suku Jawa, umumnya berdomisili di Mantewe, Kusan Hulu dan Angsana.
6. Suku Bali, umumnya berdomisili di Mantewe, Karang Bintang dan Angsana.
7. Suku Sunda, umumnya berdomisili di Batulicin dan Simpang Empat.
8. Suku Tionghoa-Indonesia, umumnya berdomisili di Simpang Empat.
9. Suku Batak, umumnya berdomisili di Simpang Empat dan Satui.
10. Suku Lombok, umumnya berdomisili di Angsana dan Mantewe.

g. Organisasi Kemasyarakatan

Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan perubahan sistem pemerintahan, membawa paradigma baru pada tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertumbuhan jumlah, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi serta tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan serta kedaulatan NKRI.

Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan, menuntut sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Tanah Bumbu perkembangan jumlah Ormas sampai dengan tahun 2016 ini terdapat total 210 buah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2016

No	Jenis Ormas	Jumlah
1	Lembaga Adat	7
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	25
3	Organisasi Keagamaan	57
4	Organisasi Kepemudaan	15
5	Organisasi Seni dan Budaya	10
6	Organisasi Wanita	5
7	Yayasan	20
8	Organisasi Profesi	37
9	Organisasi Sosial	21
10	Organisasi Pendidikan	3
11	Organisasi Keolahragaan	5
12	Lembaga Bantuan Hukum	2
13	Ormas Lainnya	3
Total		210

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

(4.11)

Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu dititik beratkan kepada analisa geografis yang mencakup kesesuaian lokasi dan aksesibilitas, keterkaitannya dengan prasarana pendukung yaitu infrastruktur transportasi, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi dan potensi pasar, serta tingkat kemajuan sektor-sektor ekonomi dan potensi unggulan.

Selaras dengan kebijakan perwilayahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu masuk dalam satuan wilayah pembangunan II, bersama dengan Kotabaru. Pusat pengembangan dari wilayah Tanah Bumbu adalah Batulicin dengan sektor unggulan adalah perikanan laut, perikanan darat, budi daya rumput laut, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Kabupaten Tanah Bumbu termasuk kedalam kawasan yang direkomendasikan sebagai sub-

koridor unggulan di Pantai Timur Kalimantan oleh kajian Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Sub-koridor ini mencakup Balikpapan - Panajam - Tanah Grogot-Batulicin dan memiliki potensi untuk disambungkan lebih lanjut dari Batulicin - Pelaihari - Banjarmasin.

Pemilihan sub-koridor Pantai Timur Kalimantan (Pantimkal) selatan 1 ini berdasarkan potensi sektor unggulan serta adanya Kawasan Andalan KAPET Batulicin, dukungan Daerah Aliaran Sungai Kendito dan Sungai Kusan serta outlet perdagangan di Pelabuhan Tanah Grogot dan Batulicin. Sebagai sub-koridor unggulan, maka pengembangan akan didorong dengan strategi pengembangan pusat permukiman, dukungan rencana pola pemanfaatan ruang serta dukungan prasarana.

Sub-koridor Pantimka Selatan 1 ini menjadi bagian dari rencana utama nasional, yaitu pengembangan Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic Development Corridor-IEDC) yang sedang dikaji rencana pengembangannya dengan dukungan dari Jepang. Koridor-koridor yang telah diidentifikasi adalah koridor Timur Sumatra-Barat Laut Jawa, Koridor Utara Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Barat Sulawesi, Timur-Bali-Nusa Tenggara dan Koridor Papua.

Untuk Koridor Kalimantan, terdapat beberapa titik pusat atau hubs, yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Koridor ini di estimasi memiliki potensi pertumbuhan PDRB sebesar 3-5 kali lipat dari \$20 milyar di tahun 2008 menjadi \$80 milyar pada 2030. Konsep koridor pertumbuhan adalah, bahwa menghubungkan titik-titik pusat ekonomi akan menciptakan efek pertumbuhan maksimal di sepanjang koridor, jika koridor tersebut memiliki potensi ekonomi yang memadai.

Lokasi Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di titik paling tenggara Pulau Kalimantan, membuatnya menjadi titik yang berpotensi strategis. Kombinasi Koridor Kalimantan dan sub-koridor Pantimkal Selatan 1 menunjukkan adanya prioritas

nasional terhadap pengembangan Tanah Bumbu sebagai titik ekonomi utama nasional. Untuk itu diperlukan dukungan prasarana dalam membuat Tanah Bumbu berfungsi sebagai sentra ekonomi nasional, terutama untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi di sub-koridor Pantimkal Selatan 1, untuk dilayani oleh pelabuhan Batulicin sejalan dengan pengembangan KAPET Batulicin.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26/2007, menyatakan bahwa setiap tingkatan rencana mempunyai kewenangan untuk menyusun kawasan strategisnya masing-masing. Pengembangan kawasan strategis berguna untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu kawasan, sehingga wilayah sekitarnya ikut berkembang. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 5 (lima) kawasan strategis yang akan dikembangkan, yaitu :

1. Kawasan Strategis Batulicin dan Gunung Tinggi

Kawasan Batulicin berperan sebagai ibukota Kabupaten dan layak ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi. Kawasan Gunung Tinggi berperan sebagai pusat pemerintahan. Secara lokasional dalam skala regional, letak kawasan ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur lintas selatan antar kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Fungsi sosial ekonomi adalah industri berat (bijih besi dan briket batu bara), Industri Hasil Laut, Pusat Perdagangan Regional (pusat koleksi distribusi), Pelabuhan Samudera dan Kawasan Bandar Udara.

2. Kawasan Strategis Pagatan

Kawasan Pagatan direncanakan sebagai kawasan strategis sosial budaya. Di kawasan Pagatan tersedia wisata budaya dan wisata alam. Fungsi wisata budaya yang diarahkan yaitu upacara adat (Mappanretasi), makam Raja Pagatan, Makam Syech Muhammad

Arsyad dan Makam Ponag Aji Toa. Fungsi kawasan strategis ekonomi adalah budi daya tambak undang (BBUG), industri ikan laut, industri konstruksi kapal penangkap ikan, industri kain tenun pagatan dan tempat pelelangan ikan (TPI).

3. Kawasan Strategis Sungai Loban

Kawasan strategis Sungai Loban layak ditetapkan kawasan strategis ekonomi teknologi tinggi pendaya gunaan sumber daya alam. Fungsi-fungsi yang diarahkan adalah industri Pembekuan ikan (*cold storage*), kawasan perkebunan, peternakan sapi, perkebunan karet, pelabuhan khusus pertambangan, Bandar udara baru dan rencana kawasan pertambangan.

4. Kawasan Strategis Satui

Kawasan Satui ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam lain, dengan fungsi –fungsi yang diarahkan perkebunan Kepala sawit, industri CPO, pelabuhan khusus pertambangan, peternakan dan kawasan pertambangan. Indusri CPO yang berada di Satui merupakan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan karena merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi APBD Kabupaten Tanah Bumbu maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

Kawasan prioritas lainnya yang akan dikembangkan dirinci menurut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan karakteristik potensi dan masalahnya. Perincian kegiatan di wilayah prioritas tersebut adalah kawasan menunjang kegiatan sektor dan kawasan yang pertumbuhannya cepat, yaitu :

- Kawasan Industri Batulicin.
- Industri Semen Batulicin.
- Pelabuhan Samudera Batulicin.

- Pelabuhan Udara Batulicin.
- Jaringan jalan tol Batulicin - Banjarbaru.
- Jaringan jalan Kandangan Batulicin.
- Jaringan jalan Banjarmasin-Batulicin-Tanah Grogot (Kaltim).
- Jalur penyeberangan Batulicin-Tanjung Serdang.
- Pembangunan PLTA Kusan di Kecamatan Kusan Hulu.
- Pembangunan Waduk Sungai Kusan di Kecamatan Kusan Hulu.

BAB V

PERSEBARAN POTENSI KONFLIK

(5.1)

Konflik Lahan

Pada bab ini disampaikan pemaparan atas data yang telah diperoleh sebagai hasil wawancara di lapangan. Akan tetapi perlu pula disampaikan bahwa dalam proses pengumpulan data di lapangan, ada sebagian informan yang agak ragu untuk menyampaikan beberapa informasi kepada tim peneliti. Hal ini disebabkan kekhawatiran para informan akan kerahasiaan identitas dan informasi yang mereka berikan.

5.1.1. Klaim Lahan

Persoalan klaim lahan yang dimaksud disini adalah terjadinya saling klaim lahan yang sama oleh warga masyarakat yang berbeda. Hal ini disebut juga tumpang tindih lahan. Artinya, sebidang lahan diakui kepemilikannya oleh dua atau lebih pihak yang berbeda, dimana masing-masing merasa sebagai pemilik lahan tersebut.

Adapun kendala dalam menyelesaikan konflik yang terjadi seperti yang disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Karang Bintang berikut ini:

"Kalau konflik lahan misalnya ada tumpang tindih, itu biasanya agak susah itu. Kalau umpama masyarakat yang berkonflik itu tadi misalnya merasa bahwa tanah yang dia miliki itu tanah turun temurun. Jadi walaupun surat-surat, sertifikat atau dokumen apa segala dia tidak punya, tapi dia bisa bersikeras bahwa tanah itu punya dia karena sudah turun-temurun *jar* (ujarnya; katanya) itu tanah dari nenek moyangnya. Nah, itu yang biasanya agak sulit. Disamping pendidikannya juga rendah, jadi dia tidak mengerti itu surat-surat apa sertifikat itu. Yang jelas bagi dia, itu tanah dia karena warisan sudah turun-temurun itu tadi. Makanya itu kita tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, RW itu kita turun tangan membantu pemerintah mengatasi itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa kita atasi, *bagamatan* (pelan-pelan) itu kita bagaimana caranya supaya masyarakat itu paham dan mau menerima."
(hasil wawancara)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa inti permasalahan klaim atau tumpang tindih lahan terjadi karena masyarakat tidak mengerti tentang legalitas kepemilikan tanah secara hukum formal. Salah satu penyebabnya adalah, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Sehingga, anggapan kepemilikan tanah secara tradisional masih berlaku dan dipegang oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif tradisional disebutkan, bahwa sebidang lahan yang digarap secara terus menerus maka kepemilikannya menjadi hak penggarap. Hak tersebut akan hilang bila tanah ditinggalkan dan tidak lagi digarap selama dua musim (Undang-

Undang Sultan Adam 1835 atau sering disingkat UUSA 1835, Pasal 28 tentang Hukum Tanah).

Dalam hal ini, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat sudah melakukan perannya dengan tepat, seperti yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Karang Bintang, dalam memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, aparat desa dan tokoh masyarakat tentunya lebih mengetahui bagaimana karakter wilayah dan penduduk dilingkungan mereka.

Juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pertanahan dan pentingnya legalitas formal atas kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah maupun lembaga yang berwenang, hingga ke pedesaan dan pedalaman. Baik itu secara langsung maupun melalui perantara aparat desa dan tokoh masyarakat.

Pemerintah daerah bisa melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun langsung ke masyarakat. Atau memberikan pelatihan, workshop maupun pembekalan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat yang nantinya akan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat dari Kecamatan Karang Bintang tersebut juga menambahkan pandangan beliau mengenai batas wilayah, seperti yang disampaikan berikut ini:

"Mengenai batas wilayah desa, perlu disosialisasikan melalui forum desa. Bahkan perlu juga disiarkan melalui khotbah pada saat shalat Jumat, agar masyarakat desa benar-benar mengetahui tentang batas wilayah desanya sehingga tidak menimbulkan konflik dengan desa lain". (hasil wawancara)

Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut tentang melibatkan tokoh dan kegiatan agama (khotbah Jumat) dalam upaya sosialisasi mengenai batas wilayah desa, merupakan

masukannya yang sangat bagus. Pemerintah daerah perlu memikirkan langkah tersebut, yaitu memberikan pelatihan, workshop maupun pembekalan kepada para tokoh agama tentang batas-batas wilayah. Sehingga, para tokoh agama dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat setempat dengan lebih terarah sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi masyarakat Tanah Bumbu yang mayoritas beragama Islam akan sangat menunjang pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh agama pada pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti khotbah Jumat tersebut.

Konflik lahan tidak hanya terjadi antara pemukiman warga dengan pihak perusahaan, tetapi dapat pula terjadi antar perusahaan, seperti yang terjadi di kecamatan Kusan Hulu berikut ini:

"Disini ada tumpang tindih lahan, yaitu antara pertambangan dengan perkebunan. Perusahaannya PT Mitra Setia Tanah Bumbu (MSTB) dengan PT Agro Bukit. Awalnya lahan diperuntukkan bagi perkebunan, lalu karena ada sumber daya batu bara di dalamnya kemudian disitu ada perebutan lahan. Maunya dialihkan ke pertambangan." (hasil wawancara)

Adapun penyelesaian dari konflik tersebut difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah, Muspida, dan DPRD Tanah Bumbu. Pada akhirnya lahan yang tumpang tindih tersebut digunakan sebagai lahan pertambangan karena pihak perusahaan tambang memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yang sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

5.1.2. Alih Fungsi Lahan

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk dibangun

menjadi kawasan industri, mencakup lahan seluas 500 Ha. Akan tetapi, di lahan milik Pemerintah Provinsi tersebut terdapat sekitar 450 buah rumah penduduk. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu konflik antara warga pemilik rumah, dengan pemerintah provinsi sebagai pemilik lahan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik, pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi kepada para warga pemilik rumah tentang rencana dibangunnya kawasan industri tersebut.

Selain itu, pada tahun 2015 pernah terjadi penembakan warga oleh pemerintah, terkait masalah indikasi pengrusakan hutan di Kecamatan Mantewe. Adapun warga yang ditembak itu berasal dari etnis Dayak. Hal tersebut juga merupakan bentuk konflik terbuka berupa demonstrasi.

Kemudian konflik lahan yang pernah terjadi adalah antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu persoalan tambak ikan masyarakat yang berada di kawasan hutan produksi milik pemerintah. Seperti yang disampaikan informan berikut ini:

"Kalau konflik antara masyarakat dengan pemerintah juga pernah terjadi, yaitu di Desa Batu Ampar RT 08 Kecamatan Simpang Empat. Yaitu warga ada punya tambak ikan, *sakalnya* (ternyata) itu ada di daerah hutan produksi *ampun* (milik) pemerintah. Nah, lalu pemerintah memberi uang tali asih, semacam ganti rugi. Awalnya warga ini tidak mau menerima. Lalu orang Dinas Kehutan Propinsi mendekati warga, mereka ada himbauan, ada sosialisasi. Polres juga ada, Muspika juga ada, lalu akhirnya masalah itu bisa selesai." (hasil wawancara)

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik serupa, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat, harus pro aktif mensosialisasikan program-program dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan wilayah hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (editor), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Amr, Abdalla, 2009, *Understanding C.R SIPABIO: A Conflict Analysis Model*, Virginia USA: The Graduate School of Islamic and Social Sciences
- Arivia, Gadis, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker "The Social Bases of Politics" dalam Arbi Sanit, "Pembaharuan Mendasar Partai Politik", dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Jakarta: LIP FISIP UI, 2003.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Terjemahan Setiawan Abadi, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, *Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2001.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J, *Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Bungin, Burhan (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Quantitative dan Qualitative*, Surabaya: Arrange University Press, 2001.
- Bottomore TB, *Elites and Society*, England: Penguin Books, 1996.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Samarinda: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda-Pustaka Pelajar, 1999.

- Approaches, Thousands Oaks, California-London-New Delhi: SAGE Publications, 1994.
- Dahl, Robert A., *Berbagai Pola Oposisi dalam Miriam Budihardjo Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Dahrendorf, Ralf, 1988, *The Modern Social Conflict: An Essay on the Politics of Liberty*, Los Angeles: University of California Press.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publication, Inc, 1994.
- Duverger, Maurice. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Pendukung*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1992.
- Folger, J.P, dan M.S. Poole, 1984, *Working Through Conflict: A Communication Perspective*, Dallas, TX: Scott, Foresman and Company
- Gephart, Robert, *Paradigm and Research Methods*, University of Alberta, 2012.
- Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, *Labyrinths of Democracy: Adaptions, Linkages, Repretations, and Politics in Urban Indianapolis*, Ind.: Bobbs-Merril, 1973.
- _____, *Politics, Self, and Society: A Theme and Variations*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hidayat, Nur, Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Kabanoff, B, 1991, *Equity, Equality, Power, and Conflict*, The Academy of Management Review.
- Kerlinger, Fred N., *Azaz-Azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

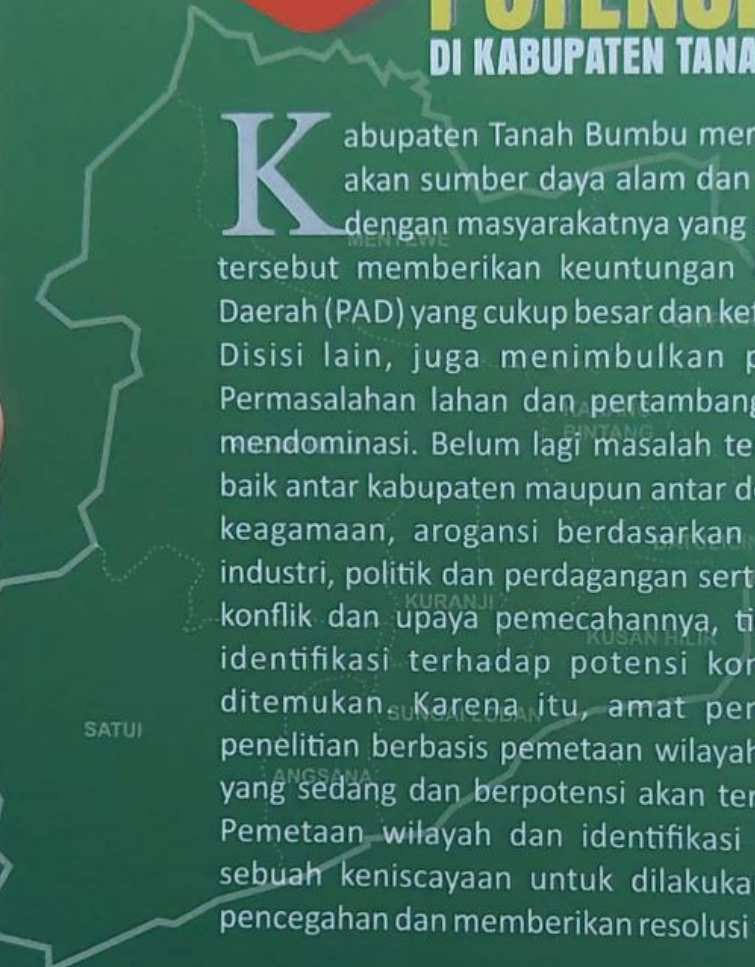
- Keller, Suzanne, *Penguasa Dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* (terjemahan Zahara D. Noer), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lipset dan Solari dalam J.W.Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Juwono Sudarsono (Editor), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1976
- Lasswell, Harold, *Politics: Who Gets What, When, How*, New York: The World Publication Company, 1972.
- Lincoln and Denzin, Norman ed, *Handbook Of Qualitatif Research*, second edition, London: SagePublication, 2002.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka
- Malo, Manase dan Trinoningtyas, Sri, *Metode Penelitian Masyarakat*, PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI, Jakarta, 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mar'iyah, Chusnul dan Suwarso Reny, *Belajar dari Politik Lokal*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- May, Tim, *Social Research: Issues, Methods and Process*, 3rd (Edn), Buncingham: Open University Press, 2001.
- Mills, C Wright, *The Power Elite*, New York: Oxford University Press, 1956.
- Mitchel, Robert, *Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (terjemahan), Jakarta: Rajawali, 1984.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Miles, M and Huberman, M, *Analisis Data Kualitatif*, Buku sumber tentang metode-metode baru, Jakarta UI Press, 1992
- Myrdal,

- Ammar, Obyektivitas Penelitian Sosial, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, USA: Allyn and Bacon, 1991.
- Patton, Michael Quin, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd (Edn), Thousand Oaks: Sage Publication, 2002.
- _____, dalam Maxy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahun 2001.
- Pennings, Paul, Keman, Hans & Kleinnijenhuis, Jan., *Doing Research in Political Science*, New Delhi-London-California, SAGE Publications, 1999.
- Pitkin, Hanna Finkel, *The Concept of Representation*, Berkeley, Calif: University of California Press, 2007.
- Raciman, W.C., *Relative Deprivation and Social Justice*, London: RPK, 1966.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus Politik, Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Robert D. Putnam dalam Mochtar Mas'od & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : UGM Press, 1978.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik*, Penelusuran Paradigma, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Sahat Simamora (editor), *Pembangunan Politik dalam Perspektif*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

- Salim, Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Dari Denzin Gubad dan Penerapannya, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- _____, (Peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002.
- Sevilla, Consuelo G., dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1973.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Soekanto, Soejono, 1989, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- SP. Varma, *Teori politik Modern*, terjemahan Yohanes Kristiarto SL, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Strauss & Corbin., 1990, *Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*, Newbury Park : Sage publication
- Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia, 2002.
- Suzanne Keller, *Penguasa dan kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern* (terj.), Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Tanter, Richard, Keneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Van Evera Stephen, *Guide To Methods For Students of Political Science*, Cornell University Press: 1997.
- Van Niel, Robert, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Ware, Alan, *Political Parties and Party Systems*, Oxford University Press: 2000.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A.M Henderson and Talcot Parsons. New York. The Free Press, 1947



PEMETAAN WILAYAH POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016



Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi dengan masyarakatnya yang sangat heterogen. Kondisi tersebut memberikan keuntungan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan ketersediaan lapangan kerja. Disisi lain, juga menimbulkan potensi konflik sosial. Permasalahan lahan dan pertambangan menjadi konflik yang mendominasi. Belum lagi masalah tenaga kerja, batas wilayah baik antar kabupaten maupun antar desa, perkembangan aliran keagamaan, arogansi berdasarkan kesukuan, perkebunan, industri, politik dan perdagangan serta transportasi. Terjadinya konflik dan upaya pemecahannya, tidak dapat dilakukan jika identifikasi terhadap potensi konflik itu sendiri belum ditemukan. Karena itu, amat penting untuk melakukan penelitian berbasis pemetaan wilayah serta jenis konflik sosial yang sedang dan berpotensi akan terjadi di masa mendatang. Pemetaan wilayah dan identifikasi potensi konflik menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan, dalam konteks upaya pencegahan dan memberikan resolusi terhadap konflik tersebut.



Kerjasama:
Center for Election and Political Party (CEPP)
Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Banjarmasin
dengan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Bumbu
2017

ISBN: 978-602-51130-0-0



Dicetak oleh:



Pustaka Banua

Jl. Pramuka, Komplek Simanung,
Pecutan Bumi, Kecamatan Arit No 19
Bilik D Banjarmasin
C.P. 081.1 5162 6292
email: opimbunua@gmail.com

Dokum
Andi